

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN BARITO UTARA



2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO UTARA**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN BARITO UTARA



2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO UTARA**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BARITO UTARA 2018

ISSN : 2654-4156
Nomor Publikasi : 62050.1924
Katalog : 4102004.6205

Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xvi + 111 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Tata Letak, Gambar Kulit, dan Infografis:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Sumber Ilustrasi Infografis:

freepik.com, flaticon.com

Ilustrasi Sampul:

Air Terjun Jantur Doyan

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Dicetak Oleh:

Amadeus Digital Printing

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum	: Ahmad Nasrullah
Koordinator Teknis	: Yulfi Noor Jayantie
Penyusun	: Anindya Pusparatri
Gambar Kulit	: Fredisen Madianu
Tata Letak	: Endang Yoanna Br Sembiring
Infografis	: Anindya Pusparatri
Penyunting	: Yulfi Noor Jayantie

<https://barutkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

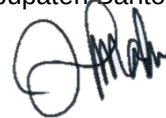
Publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Utara 2018” merupakan publikasi tahunan BPS Kabupaten Barito Utara yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2016. Publikasi ini menyajikan berbagai data dan indikator statistik yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, ditinjau dari berbagai aspek/sudut pandang yang teramati dan terukur. Indikator Kesejahteraan Rakyat disajikan dalam bentuk tabel/gambar disertai uraian singkat guna memudahkan para pengguna data.

Data-data dan informasi yang ditampilkan dalam publikasi ini bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, serta data-data sekunder yang berasal dari dinas/instansi. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup di wilayah Kabupaten Barito Utara selama tahun 2018.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak atas kontribusi dan dukungannya, sehingga publikasi ini dapat diterbitkan dengan baik. Demi penyempurnaan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) selanjutnya, kami mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari para pembaca. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Barito Utara.

Muara Teweh, November 2019

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Barito Utara



AHMAD NASRULLAH, SST

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I KEPENDUDUKAN	1
1.1. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin	4
1.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk	6
1.3. Angka Beban Tanggungan	7
1.4. Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama.....	10
1.5. Penggunaan Alat/Cara KB.....	11
BAB II KESEHATAN DAN GIZI	15
2.1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	18
2.2. Tingkat Imunisasi dan Gizi Balita.....	20
2.3. Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan.....	24
BAB III PENDIDIKAN	29
3.1. Angka Melek Huruf	32
3.2. Rata-Rata Lama Sekolah	34
3.3. Tingkat Pendidikan	35
3.4. Tingkat Partisipasi Sekolah	36
3.5. Kualitas Pelayanan Pendidikan	38
BAB IV KETENAGAKERJAAN	43
4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka.....	45
4.2. Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan.....	47
4.3. Lapangan Pekerjaan dan Status Pekerjaan	49

4.4.	Jumlah Jam Kerja	51
4.5.	Upah/Gaji/Pendapatan.....	52
4.6.	Pekerja Anak (Usia 10-17 Tahun).....	53
4.7	Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah.....	54
BAB V TARAF DAN POLA KONSUMSI.....		59
5.1.	Pengeluaran Rumah Tangga.....	61
5.2.	Konsumsi Energi dan Protein	64
BAB VI PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN		67
6.1.	Kualitas Rumah Tinggal.....	70
6.2.	Fasilitas Rumah Tinggal.....	71
6.3.	Status Kepemilikan Rumah Tinggal.....	72
BAB VII KEMISKINAN.....		75
7.1.	Perkembangan Penduduk Miskin	77
7.2.	Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	78
7.3.	Karakteristik Rumah Tangga Miskin	80
BAB VIII SOSIAL LAINNYA.....		83
8.1.	Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi	85
8.2.	Pemberian Kredit Usaha.....	88
8.3.	Tindak Kejahatan	89
DAFTAR PUSTAKA		91
LAMPIRAN		95
ISTILAH TEKNIS		107

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Jumlah, Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Utara, 2014-2018	4
Tabel 1. 2 Jumlah, Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara, 2017-2018	5
Tabel 1. 3 Luas Wilayah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara, 2018	7
Tabel 1. 4 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Barito Utara, 2014-2018.....	9
Tabel 2. 1 Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan di Kabupaten Barito Utara, 2017-2018 (Persen).....	24
Tabel 2. 2 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Barito Utara, 2017-2018 (Persen) ...	26
Tabel 2. 3 Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk di Kabupaten Barito Utara, 2014-2018.....	27
Tabel 3. 1 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Usia Sekolah di Kabupaten Barito Utara, 2017-2018.....	37
Tabel 3. 2 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan di Kabupaten Barito Utara, 2017-2018	38
Tabel 4. 1 Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal*) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Barito Utara, 2018**) (Rupiah)	52
Tabel 5. 1 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Utara, 2017-2018	62
Tabel 5. 2 Persentase Penduduk Kabupaten Barito Utara Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita, 2017-2018	63

Tabel 6. 1	Karakteristik Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Barito Utara, 2016-2018	70
Tabel 6. 2	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Barito Utara, 2016-2018 (Persen)	71
Tabel 7. 1	Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Rp/Kapita/bulan) di Kabupaten Barito Utara, 2014-2018	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Barito Utara, 2017-2018 (Persen).....	10
Gambar 1.2 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/ Cara Kontrasepsi Menurut Alat/ Cara KB di Kabupaten Barito Utara, 2017-2018	12
Gambar 2.1 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Barito Utara, 2014-2018	18
Gambar 2.2 Angka Kesakitan dan Rata-Rata Lama Sakit Penduduk di Kabupaten Barito Utara, 2016-2018.....	19
Gambar 2.3 Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Disusui dan Rata-Rata Lama Disusui di Kabupaten Barito Utara, 2015-2017	21
Gambar 2.4 Persentase Balita yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Barito Utara, 2015-2017.....	22
Gambar 2.5 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Anak Terakhir 2 Tahun yang Lalu atau Kurang Menurut Berat Badan Anak lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan Kabupaten Barito Utara, 2018	23
Gambar 3.1 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Utara, 2016-2018	33
Gambar 3.2 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas di Kabupaten Barito Utara, 2014-2018 (Tahun)	34
Gambar 3.3 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Barito Utara, 2017-2018.....	35

Gambar 3.4	Rasio Murid-Guru di Kabupaten Barito Utara, Tahun Ajaran 2014/2015 s.d. 2018/2019	39
Gambar 3.5	Rasio Guru-Sekolah di Kabupaten Barito Utara, Tahun Ajaran 2014/2015-2018/2019.....	40
Gambar 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Barito Utara, 2014-2018 ^{*)}	46
Gambar 4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Barito Utara, 2014-2018 ^{*)}	47
Gambar 4.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Barito Utara, 2018	48
Gambar 4.4	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Utara, 2015-2018 ^{*)}	49
Gambar 4.5	Komposisi Penduduk Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Barito Utara, 2018	50
Gambar 4.6	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jam Kerja Selama Seminggu di Kabupaten Barito Utara, 2017-2018.....	51
Gambar 4.7	Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Formal dan Informal ^{*)} Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Barito Utara, 2018 (Ribu Rupiah)	53
Gambar 4.8	Persentase Penduduk Umur 10-17 Tahun yang Bekerja di Kabupaten Barito Utara, 2017-2018	54
Gambar 4.9	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kalimantan Tengah, 2018 (Jiwa)	55
Gambar 4.10	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Kalimantan Tengah, 2016-2018	56
Gambar 4.11	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Menurut Tingkat Pendidikan Kalimantan Tengah, 2018	57

Gambar 5.1	Rata-Rata Konsumsi Kalori Perkapita per Hari di Kabupaten Barito Utara, 2015-2018 (kkal)	64
Gambar 5.2	Rata-Rata Konsumsi Protein Perkapita per Hari di Kabupaten Barito Utara, 2015-2018 (gram)	65
Gambar 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Barito Utara, 2016-2018	73
Gambar 7. 1	Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Barito Utara, 2014-2018.....	78
Gambar 8. 1	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Terhadap Telepon Rumah dan Telepon Seluler di Kabupaten Barito Utara, 2018	86
Gambar 8. 2	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Terhadap Komputer dan Internet di Kabupaten Barito Utara, 2016-2018.....	87
Gambar 8.3	Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha di Kabupaten Barito Utara, 2016-2018.....	88
Gambar 8.4	Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan di Kabupaten Barito Utara, 2016-2018	89

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara, 2014-2018 (Jiwa)97
Lampiran 2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Barito Utara, 2014-2018 (Jiwa).....98
Lampiran 3	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara KB dan Daerah Tinggal di Kabupaten Barito Utara, 2016-2018 (Persen)99
Lampiran 4	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Barito Utara, 2014-2018.....100
Lampiran 5	Jumlah Murid, Guru, dan Sekolah di Kabupaten Barito Utara, Tahun Ajaran 2013/2014-2017/2018.....101
Lampiran 6	Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Barito Utara, 2016-2018 (Persen)102
Lampiran 7	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Untuk Minum di Kabupaten Barito Utara, 2016-2018 (Persen)103
Lampiran 8	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama di Kabupaten Barito Utara, 2018 (Persen).....104
Lampiran 9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018.....105
Lampiran 10	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kabupaten/Kota, 2018 (Rupiah)106

1

Kependudukan

Kabupaten Barito Utara 2018

Komposisi Penduduk

0-14 tahun

28,21 persen

15-64 tahun

68,54 persen

lebih dari
65 tahun

3,25

persen

Angka
Ketergantungan

45,90

Sex Ratio

laki-laki

67.851

jiwa

108

perempuan

62.438

jiwa

Jumlah Penduduk

130.019 jiwa



1

KEPENDUDUKAN

Penduduk adalah subjek sekaligus objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan penduduk harus dididik, dibina, dan dikembangkan, sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sementara sebagai objek pembangunan, penduduk harus dapat menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Pembangunan dikatakan berhasil apabila hasil dari pembangunan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk. Dengan demikian, pembangunan harus memperhitungkan kemampuan penduduk sehingga penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan.

Penduduk dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dapat terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali serta tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk. Pemenuhan kebutuhan yang dimaksud mencakup sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak serta tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi menyebabkan terjadinya kelaparan dan meningkatkan jumlah kematian penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadi gangguan keamanan akibat maraknya tindak kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus

Kependudukan

dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

1.1. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk didefinisikan sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan data BPS dalam Proyeksi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah 2010-2020, jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara tahun 2018 mencapai 130.019 jiwa. Kondisi tersebut mengalami kenaikan sebesar 732 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 yang mencapai 129.287 jiwa. Apabila dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara mengalami peningkatan sekitar 2,79 persen dari jumlah penduduk tahun 2014 yang telah mencapai 126.494 jiwa. Dengan kata lain, dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah penduduk Barito Utara telah mengalami penambahan penduduk sebanyak 3.525 jiwa.

Tabel 1.1 Jumlah, Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Utara, 2014-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penduduk	126 494	127 479	128 400	129 287	130 019
Laki-laki	65 669	66 211	66 715	67 179	67 581
Perempuan	60 825	61 268	61 685	62 108	62 438
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,85	0,78	0,72	0,69	0,57
Rasio Jenis Kelamin	108	108	108	108	108

Sumber : Proyeksi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah 2010-2020

Laju pertumbuhan penduduk mengukur seberapa cepat populasi mengalami perubahan. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah, dipengaruhi oleh kelahiran, kematian serta tingkat migrasi. Laju pertumbuhan penduduk Barito Utara tahun 2018 mencapai 0,57 persen atau mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, laju pertumbuhan penduduk Barito Utara sebesar 0,85 persen dan mengalami

Kependudukan

perlambatan laju pertumbuhan pada tahun 2015 hingga mencapai 0,78 persen. Kemudian terus mengalami perlambatan dalam tiga tahun selanjutnya yakni 0,72 persen (2016); 0,69 persen (2017) dan 0,57 persen (2018).

Apabila ditinjau menurut kecamatan, pada periode 2017-2018 seluruh kecamatan di Kabupaten Barito Utara telah melampaui laju pertumbuhan penduduk kabupaten dengan laju pertumbuhan penduduk tercepat yaitu Kecamatan Teweh Tengah (0,62 persen), Kecamatan Teweh Baru (0,62 persen), dan Kecamatan Teweh Selatan (0,62 persen). Sementara itu, kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Gunung Timang (0,46 persen) dan Kecamatan Lahei Barat (0,46 persen).

Tabel 1.2 Jumlah, Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara, 2017-2018

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Rasio Jenis Kelamin		Pertumbuhan Penduduk (Persen)
	2017	2018	2017	2018	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Montallat	11 280	11 344	107	107	0,56
Gunung Timang	10 594	10 643	107	107	0,46
Gunung Purei	2 562	2 574	108	109	0,47
Teweh Timur	6 121	6 150	110	110	0,47
Teweh Tengah	44 849	45 127	106	106	0,62
Teweh Baru	17 882	17 993	108	109	0,62
Teweh Selatan	13 445	13 528	118	118	0,62
Lahei	12 456	12 515	109	109	0,47
Lahei Barat	10 098	10 145	108	108	0,46
Barito Utara	129 287	130 019	108	108	0,57

Sumber : Proyeksi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah 2010-2020

Apabila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin, pada tahun 2018 penduduk Kabupaten Barito Utara terdiri dari 67.581 orang laki-laki (51,98 persen) dan 62.438 orang perempuan (48,02 persen). Rasio jenis kelamin Kabupaten Barito Utara tahun 2018 sebesar 108 yang berarti bahwa di setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 108 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Barito Utara lebih banyak daripada jumlah

Kependudukan

penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin berdasarkan kecamatan menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin di setiap kecamatan bernilai lebih dari 100. Rasio jenis kelamin tertinggi terjadi di Kecamatan Teweh Selatan, yaitu sebesar 118. Sementara rasio jenis kelamin terendah ada di Kecamatan Teweh Tengah dengan nilai rasio sebesar 106.

1.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu permasalahan terkait meningkatnya jumlah penduduk suatu wilayah yaitu distribusi penduduk yang tidak merata. Hal ini berdampak pada kepadatan penduduk di wilayah tersebut yang pada akhirnya berpengaruh pada kesejahteraan penduduk. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran apabila tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lainnya, wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan tentang optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Persebaran penduduk di Kabupaten Barito Utara sampai tahun 2018 masih relatif belum merata. Selama ini persebaran penduduk Kabupaten Barito Utara terkonsentrasi di Kecamatan Teweh Tengah. Hal ini dikarenakan Kecamatan Teweh Tengah merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Barito Utara. Berbagai fasilitas penunjang perekonomian masyarakat tersedia, seperti rumah sakit, sekolah, bandar udara serta pasar permanen. Penduduk Kecamatan Teweh Tengah di tahun 2018 mencapai 34,71 persen dari total penduduk Kabupaten Barito Utara. Sementara itu, kecamatan dengan persentase penduduk terkecil tahun 2018 adalah Kecamatan Gunung Purei, yaitu sebesar 1,98 persen dari total penduduk Kabupaten Barito Utara.

Persebaran penduduk Kabupaten Barito Utara yang tidak merata selain karena kecenderungan penduduk memilih tinggal di pusat perekonomian juga dikarenakan kurangnya sarana jalan darat yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lain. Akibatnya, penduduk lebih banyak memanfaatkan

Kependudukan

sungai sebagai sarana transportasi. Dengan berfungsinya sungai sebagai sarana transportasi perhubungan untuk semua kegiatan masyarakat, maka daerah-daerah sepanjang aliran sungai menjadi daerah pemukiman penduduk. Sementara itu, daerah-daerah yang jauh dari aliran sungai jarang dihuni oleh penduduk, meskipun kadangkala daerah tersebut merupakan daerah potensial untuk pertanian, industri, pertambangan, dan lain sebagainya.

Tabel 1.3 Luas Wilayah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara, 2018

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Distribusi Penduduk (Persen)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)
Montallat	553,00	11 344	8,72	21
Gunung Timang	890,00	10 643	8,19	12
Gunung Purei	1 468,00	2 574	1,98	2
Teweh Timur	592,22	6 150	4,73	10
Teweh Tengah	585,36	45 127	34,71	77
Teweh Baru	812,78	17 993	13,84	22
Teweh Selatan	485,64	13 528	10,40	28
Lahei	1 618,48	12 515	9,63	8
Lahei Barat	1 294,52	10 145	7,80	8
Barito Utara	8 300,00	130 019	100,00	16

Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka 2019

Pada tahun 2018, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Barito Utara hanya sebesar 16 jiwa per kilometer persegi. Apabila ditinjau menurut kecamatan, wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Teweh Tengah, dengan tingkat kepadatan mencapai 77 jiwa per kilometer persegi. Sementara itu, kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Gunung Purei dengan kepadatan penduduk 2 jiwa per kilometer persegi.

1.3. Angka Beban Tanggungan

Angka Beban Tanggungan atau disebut juga Rasio Ketergantungan (*Dependencey Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Angka ini menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif (kelompok umur 15-64 tahun) atas penduduk usia tidak produktif (14 tahun ke

Kependudukan

bawah dan 65 tahun ke atas). Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif (kelompok umur 15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi (penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun).

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan salah satunya dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Angka beban ketergantungan juga dapat menunjukkan tanda-tanda adanya bonus demografi. Bonus demografi adalah kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif sangat besar dan menanggung penduduk usia tidak produktif yang kecil, yaitu angka ketergantungan di bawah 50 yang berarti bahwa satu orang penduduk tidak produktif ditanggung oleh 2 orang penduduk produktif. Di satu sisi, bonus demografi akan sangat menguntungkan apabila penduduk usia produktif mempunyai keterampilan sehingga dapat meningkatkan kemakmuran negara. Di sisi lain, bonus demografi dapat juga menjadi beban dan ancaman bagi negara apabila penduduk usia produktif lebih banyak yang menganggur, tidak berpendidikan, dan tidak mempunyai *skill*. Oleh karena itu, investasi pendidikan, kesehatan, dan keterampilan pada penduduk usia produktif dan anak-anak sangat penting, agar bonus demografi yang menguntungkan dapat tercapai. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah 2010-2020, tahun 2013 sampai dengan sekarang Kabupaten Barito Utara sudah mencapai bonus demografi.

Selama periode 2014-2018 rasio ketergantungan di Kabupaten Barito Utara cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 angka beban tanggungan Kabupaten Barito Utara mencapai 48,58 persen. Hal ini berarti dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 48 sampai 49 penduduk usia tidak produktif. Kemudian angka beban tanggungan terus mengalami penurunan hingga mencapai 45,90 persen pada tahun 2018. Hal

Kependudukan

ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 setiap 100 penduduk produktif masih harus menanggung beban 45 sampai 46 penduduk tidak produktif.

Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Tabel 1.4. menunjukkan bahwa di tahun 2014 ada sebesar 29,77 persen penduduk Barito Utara yang berusia muda (0-14 tahun) dan turun menjadi 29,39 persen di tahun 2015. Hingga tahun 2018, proporsi penduduk usia 0-14 tahun turun menjadi 28,21 persen.

Tabel 1. 4 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Barito Utara, 2014-2018

Tahun	Kelompok Penduduk (Persen)			Angka Beban Ketergantungan
	0-14 tahun	15-64 tahun	≥ 65 Tahun	
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)
2014	29,77	67,30	2,92	48,58
2015	29,39	67,62	2,98	47,88
2016	28,97	67,97	3,06	47,13
2017	28,76	68,01	3,23	46,47
2018	28,21	68,54	3,25	45,90

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Pada Tabel 1.4 terlihat bahwa struktur umur penduduk Barito Utara didominasi oleh penduduk usia produktif. Berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2020, penduduk usia produktif mencapai 67,30 persen pada tahun 2014 dan kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi sebesar 67,62 persen dan terus-menerus meningkat menjadi 68,54 persen pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambah tahun, penduduk usia produktif Kabupaten Barito Utara menjadi sangat potensial sehingga dapat menjadi modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) semakin bertambah dari 2,92 persen pada tahun 2014 menjadi 2,98 persen pada tahun 2015 dan 3,25 persen pada tahun 2018.

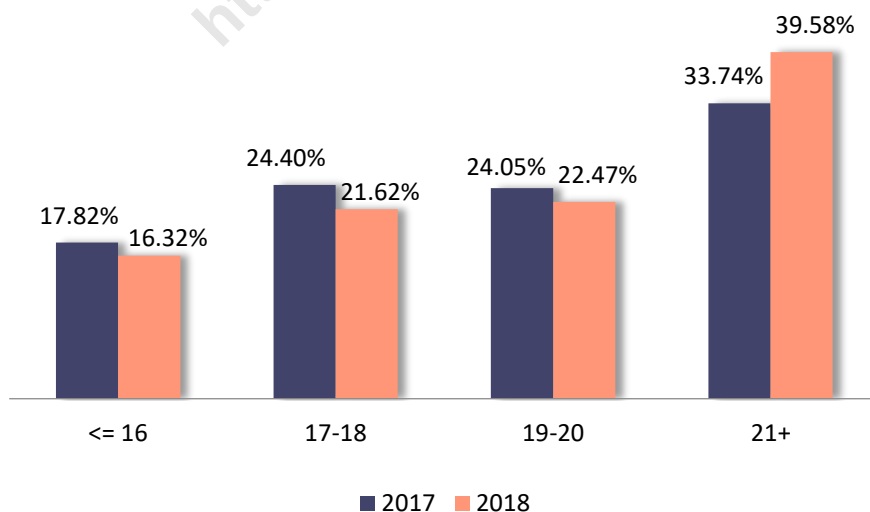
Kependudukan

1.4. Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan.

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Gambar 1.1 Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Barito Utara, 2017-2018 (persen)



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2017-2018

Persentase wanita berusia 16 tahun ke bawah di Kabupaten Barito Utara yang melakukan perkawinan pertamanya berdasarkan hasil Susenas tahun 2018 sebesar 16,32 persen atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 17,82 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat mengenai usia ideal untuk melakukan perkawinan pertama meningkat. Namun demikian tetap diperlukan adanya sosialisasi dari pihak terkait tentang pentingnya pernikahan pada usia ideal mengingat masih banyak penduduk yang melakukan perkawinan pertama saat masih berada di bawah 21 tahun. Seseorang yang melakukan perkawinan pertama terutama pada usia 16 tahun ke bawah beresiko pada keselamatan ibu maupun anak. Hal ini dikarenakan belum matangnya rahim wanita usia muda untuk hamil ataupun karena belum siapnya mental wanita muda untuk berumah tangga.

Sebagian besar wanita melakukan perkawinan pertama pada usia 21 tahun ke atas. Persentasenya pun meningkat dibanding tahun 2017 dari 33,74 persen pada tahun 2017 menjadi 39,58 persen pada tahun 2018. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar lebih banyak lagi wanita di Kabupaten Barito Utara yang menunda perkawinan pertama pada usia muda. Sementara itu, pada tahun 2018 persentase yang hampir sama terlihat pada wanita yang melakukan perkawinan pertama pada usia 17-18 tahun dan 19-20 tahun masing-masing sebesar 21,62 persen dan 22,47 persen.

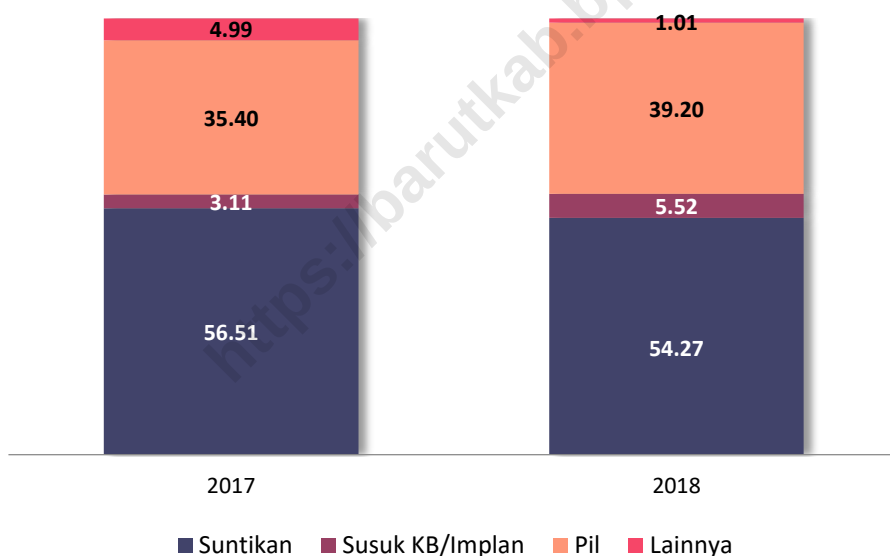
1.5. Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB dengan berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implan. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Kependudukan

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sementara dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, harga yang terjangkau, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunaanya.

Gambar 1.2 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/ Cara Kontrasepsi Menurut Alat/ Cara KB di Kabupaten Barito Utara, 2017-2018



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2017-2018

Gambar 1.2 memperlihatkan persentase alat atau cara KB yang digunakan oleh perempuan berumur 15-49 tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan kontrasepsi. Terlihat dari berbagai macam alat/cara KB yang digunakan, suntikan dan pil yang paling banyak diminati. Pada tahun 2017, penggunaan suntikan mencapai 56,51 persen dan menurun menjadi 54,27 persen pada tahun 2018. Sementara itu, penggunaan pil justru mengalami peningkatan dari 35,40 persen pada tahun 2017 menjadi 39,20 persen pada

Kependudukan

tahun 2018. Adapun penggunaan susuk KB/implan masih relatif sedikit, yakni hanya mencapai 5,52 persen di tahun 2018. Persentase tersebut telah mengalami kenaikan dari tahun 2017 yang mencapai 3,11 persen. Penggunaan alat/ cara kontrasepsi lainnya justru mengalami penurunan dari 4,99 persen di tahun 2017 menjadi 1,01 persen di tahun 2018. Penggunaan alat/ cara kontrasepsi lainnya diantaranya sterilisasi wanita/tubektomi/MOW, sterilisasi pria/vasektomi/MOP, IUD/AKDR/spiral, kondom pria/karet KB, intravag/kondom wanita/diafragma, metode menyusui alami, pantang berkala/kalender serta metode lainnya.

<https://barutkab.bps.go.id>

2

Kesehatan & Gizi

Kabupaten Barito Utara 2018

Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan



Dokter
20,75
persen



Bidan
67,28
persen



Dukun Tradisional
11,97
persen

Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk



2

KESEHATAN DAN GIZI

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu wilayah, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan di antaranya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes, dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

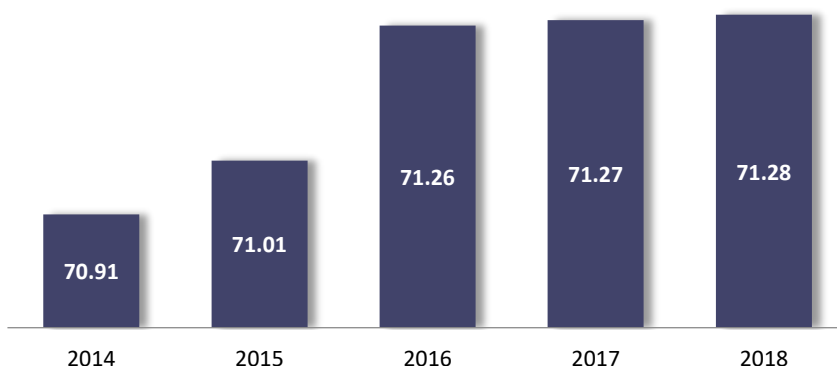
Kesehatan dan Gizi

2.1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat sangatlah penting. Dengan mengetahui derajat kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah, dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan di bidang kesehatan bagi pemerintah di wilayah tersebut. Pembangunan dapat diarahkan menuju peningkatan kualitas kesehatan masyarakat setempat terutama dari segi kualitas pelayanan maupun kemampuan penyediaan infrastruktur kesehatan yang memadai. Hal ini bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan secara mudah, murah, dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian derajat kesehatan masyarakat adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup atau *life expectancy rate* merupakan suatu ukuran yang menyatakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Pada tahun 2018, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Barito Utara mencapai 71,28 tahun, hampir sama dengan tahun 2017 yang mencapai 71,27 tahun. Angka harapan hidup tersebut berarti bahwa bayi yang lahir pada tahun 2017 maupun 2018 diestimasi dapat hidup hingga 71 atau 72 tahun lagi.

Gambar 2.1 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Barito Utara, 2014-2018



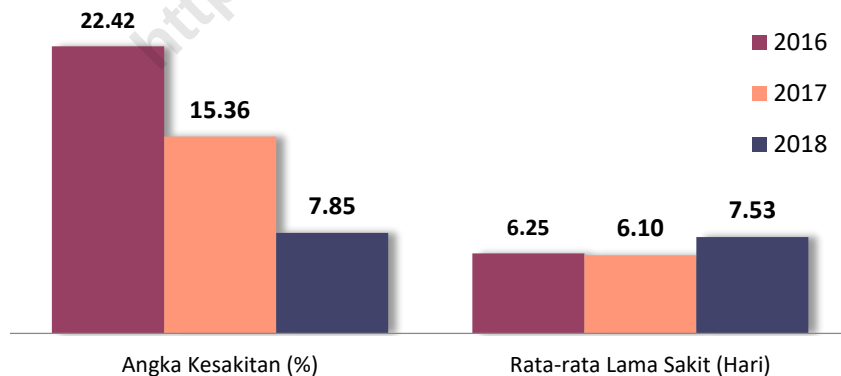
Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2019

Kesehatan dan Gizi

Indikator lain yang dapat mengukur taraf kesehatan penduduk suatu masyarakat adalah angka kesakitan atau morbiditas. Morbiditas merupakan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Angka kesakitan atau morbiditas dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan kesehatan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Keluhan kesehatan dapat didefinisikan sebagai gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lainnya yang dapat menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari baik dalam hal melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga, maupun melakukan aktivitas lainnya.

Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dan lain-lain dan lain-lain. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Gambar 2.2 Angka Kesakitan dan Rata-Rata Lama Sakit Penduduk di Kabupaten Barito Utara, 2016-2018



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, 2016-2018

Angka kesakitan penduduk Kabupaten Barito Utara tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Barito Utara semakin menyadari akan pentingnya kualitas kesehatan masyarakat. Hasil Susenas tahun 2018 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Kabupaten Barito Utara mencapai 7,85 persen.

Kesehatan dan Gizi

Artinya selama tahun 2018 ada sebesar 7,85 persen penduduk Kabupaten Barito Utara yang mengalami keluhan kesehatan dan merasa terganggu dalam aktivitas sehari-hari (tidak dapat melakukan kegiatan secara normal seperti bekerja, sekolah atau kegiatan sehari-harinya sebagaimana biasanya).

Lamanya sakit merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu wilayah. Rata-rata Lama Sakit menunjukkan rata-rata banyaknya hari sakit pada penduduk yang mengalami gangguan/keluhan kesehatan. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat intensitas penyakit yang diderita oleh penduduk, menggambarkan besarnya kerugian materiil yang dialami penduduk karena penyakit yang diderita, mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum dan menunjukkan seberapa serius keluhan yang diderita. Apabila nilai rata-rata lama sakit semakin besar, maka semakin buruk tingkat kesehatan suatu daerah serta kerugian materiil yang dialami oleh penduduk.

Hasil Susenas tahun 2017 dan 2018 menunjukkan bahwa rata-rata lama sakit penduduk berada pada kisaran 6-7 hari. Pada tahun 2018, rata-rata lama sakit penduduk Kabupaten Barito Utara mencapai 7,53 hari atau mengalami kenaikan sebesar 23,44 persen dari tahun sebelumnya. Semakin lamanya kesakitan (jumlah rata-rata hari sakitnya banyak), maka keluhan kesehatan suatu penyakit yang dialami penduduk dapat diasumsikan cukup serius dan dapat memengaruhi tingkat produktivitas penduduk.

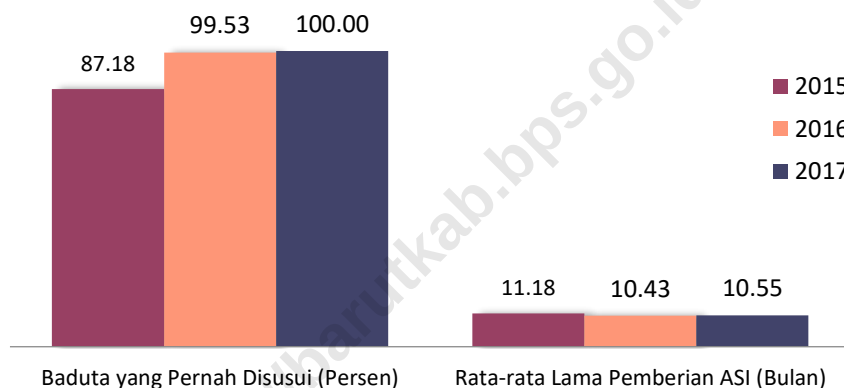
2.2. Tingkat Imunisasi dan Gizi Balita

Ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Kemudian sangat dianjurkan untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi setelah lahir karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI memiliki manfaat sangat besar dalam jangka panjang karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap. ASI mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan

Kesehatan dan Gizi

bayi dan melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan atau mengganti makanan/minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan ke atas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 (dua) tahun.

Gambar 2.3 Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Disusui dan Rata-Rata Lama Disusui di Kabupaten Barito Utara, 2015-2017



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2015-2017 (Diolah)

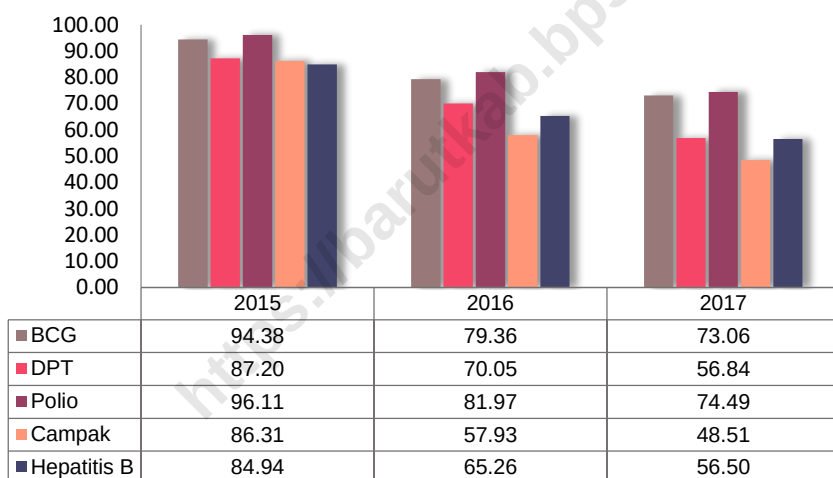
Seorang ibu dianjurkan dapat menyusui bayinya selama 2 (dua) tahun karena semakin lama bayi mendapatkan ASI (Air Susu Ibu) akan memberikan kekebalan atau proteksi yang lebih kuat bagi bayi. Pada tahun 2017, seluruh baduta di Kabupaten Barito Utara pernah disusui (diberi ASI). Rata-rata pemberian ASI berkisar 10-11 bulan, menurun dari tahun 2015 yang mencapai kisaran 11-12 bulan. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi perencana di bidang kesehatan untuk dapat memberikan penyuluhan terkait pentingnya pemberian ASI selama 2 (dua) tahun bagi ibu menyusui.

Selain pemberian ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif yakni kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes.

Kesehatan dan Gizi

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi mengartikan imunisasi sebagai suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang di sekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili, dan Hepatitis B.

Gambar 2.4 Persentase Balita yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Barito Utara, 2015-2017



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2015-2017 (Diolah)

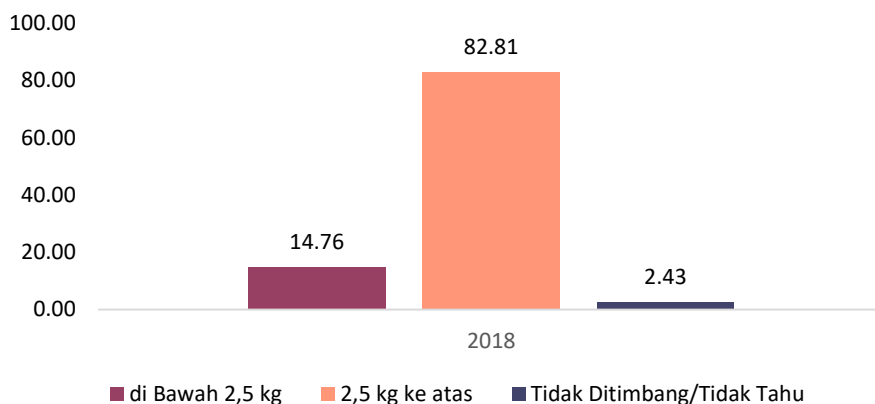
Selama tahun 2015-2017, persentase balita yang pernah diimunisasi di Kabupaten Barito Utara terus menurun pada semua jenis imunisasi. Pada tahun 2015, persentase anak usia kurang dari 5 (lima) tahun yang pernah diimunisasi di Kabupaten Barito Utara mencapai lebih dari 80 persen untuk setiap jenis imunisasi wajib. Namun, pada tahun 2016 dan 2017 persentase anak usia kurang dari 5 (lima) tahun yang pernah diimunisasi mengalami penurunan untuk semua jenis imunisasi wajib. Pada tahun 2016 dan 2017 persentase anak usia kurang dari 5 (lima) tahun yang pernah diimunisasi semakin menurun yakni BCG (dari 79,36 persen menjadi 73,06 persen), DPT (dari 70,05 persen menjadi 56,84 persen), polio (dari 81,97 persen menjadi

Kesehatan dan Gizi

(74,49 persen), campak (dari 57,93 persen menjadi 48,51 persen) dan hepatitis B (65,26 persen menjadi 56,50 persen). Hal ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah mengingat imunisasi wajib ini sangat dianjurkan untuk diberikan ke balita agar balita memiliki kekebalan tubuh terhadap penyakit.

Selain pemberian ASI dan imunisasi, indikator pendukung lainnya yang menunjukkan kualitas gizi dari bayi dan ibu hamil adalah bayi dengan berat lahir rendah (BBLR). BBLR adalah kondisi bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2,5 kg. Berat badan bayi ditimbang dalam waktu satu jam pertama setelah lahir. 2,5 kg merupakan berat minimal seorang bayi untuk dikatakan bayi sehat dan memiliki peluang untuk terus hidup. Kondisi BBLR ini tidak hanya dapat terjadi pada bayi prematur, tapi juga pada bayi cukup bulan yang mengalami hambatan pertumbuhan selama kehamilan. Salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan bayi yang mengakibatkan terjadinya BBLR adalah kondisi kesehatan dan masalah emosional dari sang Ibu seperti sang Ibu kurang memakan makanan bergizi selama kehamilan, stres berat selama kehamilan, memiliki penyakit kronis, merokok selama kehamilan, atau sang Ibu memiliki masalah kesehatan seperti infeksi rahim atau pun infeksi saluran kemih.

Gambar 2.5 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Anak Terakhir 2 Tahun yang Lalu atau Kurang Menurut Berat Badan Anak lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan Kabupaten Barito Utara, 2018



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018 (Diolah)

Kesehatan dan Gizi

Pada tahun 2018, persentase wanita usia subur (WUS) yang melahirkan anak terakhir dua tahun yang lalu atau kurang dengan kondisi BBLR ada sebesar 14,76 persen, berbeda jauh dengan WUS yang melahirkan anak dengan berat 2,5 kilogram ke atas yang sudah mencapai 82,81 persen. Walaupun nilainya sudah rendah, kondisi BBLR ini masih perlu diberi perhatian lebih agar tidak ada lagi bayi yang berat saat lahir di bawah 2,5 kilogram, di luar bayi tersebut lahir prematur. Kondisi-kondisi tersebut dapat dicegah dengan penanganan yang tanggap dari sang Ibu dan keluarga untuk menjaga kesehatan sang Ibu. Maka dari itu, persentase WUS yang melahirkan anak dengan kondisi BBLR yang besar menggambarkan semakin rendahnya status kesehatan dan gizi masyarakat.

2.3. Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Salah satu upaya dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi serta menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), dapat dilakukan dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neo natal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan.

Tabel 2.1 Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan di Kabupaten Barito Utara, 2017-2018 (Persen)

Penolong Persalinan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Tenaga Kesehatan	69,13	88,03
Dokter	17,73	20,75
Bidan	51,40	67,28
Tenaga Kesehatan Lainnya	0,00	0,00
Bukan Tenaga Kesehatan	30,87	11,97
Dukun Tradisional	30,87	11,97
Lainnya	0,00	0,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017 dan 2018 (Diolah)

Secara umum, pada tahun 2017 dan 2018 pertolongan persalinan oleh tenaga medis lebih banyak dipilih. Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mengalami kenaikan selama tahun di tahun 2018 dibanding tahun 2017, dari 69,13 persen menjadi 88,03 persen. Kenaikan ini disokong

Kesehatan dan Gizi

oleh kenaikan persentase penolong persalinan oleh tenaga medis, yaitu dokter sebesar 3,02 persen dan bidan sebesar 15,88 persen. Sementara itu, penolong persalinan oleh bukan tenaga kesehatan yaitu dukun tradisional menurun secara signifikan dari 30,87 persen di tahun 2017 menjadi 11,97 persen di tahun 2018. Meningkatnya jumlah bidan pada 2018 dan perbaikan akses ke fasilitas kesehatan membuat masyarakat memilih untuk menggunakan bantuan tenaga kesehatan untuk melakukan persalinan.

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan tetapi juga dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, kemampuan sosial-ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya serta jenis pelayanan kesehatan. Dengan diterapkannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) secara nasional mulai Januari tahun 2014, diharapkan akan membuka akses dan peluang yang lebih besar kepada masyarakat secara umum untuk mendapatkan haknya mendapatkan pelayanan kesehatan gratis sekaligus mendukung tingkat kesehatan masyarakat Indonesia dan Kalimantan Tengah khususnya menjadi lebih baik.

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Tampak perbedaan kualitas kesehatan yang nyata antara penduduk di perdesaan dengan penduduk perkotaan. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan ketersediaan dan jarak menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, ditambah lagi perilaku atau kebiasaan penduduk itu sendiri. Persentase penduduk di daerah perkotaan yang berobat ke praktek dokter/klinik pada umumnya lebih tinggi dari pada di perdesaan, mengingat lebih mudahnya akses dan kualitas pelayanan yang jauh lebih baik.

Kesehatan dan Gizi

Sebagai dampaknya, akan terlihat berbagai keluhan dan masalah kesehatan segera tertangani lebih cepat dan lebih baik di perkotaan.

Berdasarkan hasil Susenas 2017 dan 2018 yang dirangkum dalam publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kalimantan Tengah, persentase penduduk yang berobat jalan ke puskesmas/pustu mengalami penurunan yang signifikan yaitu dari 80,27 persen menjadi 33,39 persen. Hal ini berbeda dengan kondisi tempat berobat jalan rumah sakit dan praktek dokter/bidan/nakes/klinik/UKBM yang mengalami kenaikan menjadi 21,80 persen untuk rumah sakit dan 43,75 persen untuk praktek dokter/bidan/nakes/klinik/UKBM pada 2018. Praktek dokter/bidan/nakes/klinik/UKBM menjadi pilihan utama penduduk Kabupaten Barito Utara untuk berobat jalan dibanding tempat berobat lainnya. Sementara itu, persentase penduduk yang berobat jalan ke praktek pengobatan tradisional mengalami penurunan menjadi 2,01 persen pada 2018. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih untuk berobat jalan ke fasilitas kesehatan atau medis.

Tabel 2.2 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Barito Utara, 2017-2018 (Persen)

Tempat Berobat	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Rumah Sakit	8,33	21,80
Praktek Dokter/Bidan/ Nakes/Klinik/UKBM	16,23	43,75
Puskesmas/Pustu	80,27	33,39
Praktek Pengobatan Tradisional	4,03	2,01
Dukun Bersalin dan Lainnya	0,00	0,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017 dan 2018 (Diolah)

Ketersediaan tenaga kesehatan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terus diusahakan oleh pemerintah. Hal tersebut tercermin dari salah satu sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2015-2019, yaitu meningkatnya jumlah, jenis, kualitas, dan pemerataan tenaga kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: (a) Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak 5.600 puskesmas; (b) Persentase rumah sakit kabupaten/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60

Kesehatan dan Gizi

persen; (c) Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 56.910 orang.

Tabel 2. 3 Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk di Kabupaten Barito Utara, 2014-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tenaga Medis (Dokter)	19	41	33	30	20
Tenaga Keperawatan	164	126	284	237	165
Tenaga Kebidanan	97	87	141	134	139
Tenaga Kefarmasian	13	11	19	23	15
Tenaga Kesehatan Lainnya	-	56	16	172	70*

Keterangan:

*Pada 2018, Tenaga Kesehatan Lainnya adalah Ahli Gizi

Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2015-2019

Pada Tabel 2.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 ketersediaan tenaga kesehatan per 100.000 penduduk cenderung meningkat dibandingkan tahun 2014. Ketersediaan dokter selama 2014-2018 mengalami kenaikan yakni dari 19 dokter per 100.000 penduduk pada tahun 2014 menjadi 20 dokter per 100.000 penduduk pada tahun 2018. Kenaikan tertinggi terjadi pada tenaga kebidanan, dari 97 bidan per 100.000 penduduk di tahun 2014 menjadi 139 bidan per 100.000 penduduk di tahun 2018. Kenaikan juga terjadi pada tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian serta tenaga kesehatan lainnya yang mengalami kenaikan dari 2014 ke 2018.

3

Pendidikan

Kabupaten Barito Utara 2018

Angka Melek Huruf



perempuan

99,36

persen

99,61
persen



laki-laki

99,84

persen

Angka Partisipasi Murni



SD

100

persen



SMP

84,42

persen



SMA

62,35

persen



Rata-rata Lama Sekolah

8,59 tahun

3

PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31. Oleh sebab itu maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang UU No. 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar.

Pendidikan

UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warga negara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Dalam beberapa tahun ke depan pembangunan pendidikan nasional masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja, mencakup:

1. Pemerataan dan perluasan akses,
2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing,
3. Penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik,
4. Peningkatan pembiayaan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

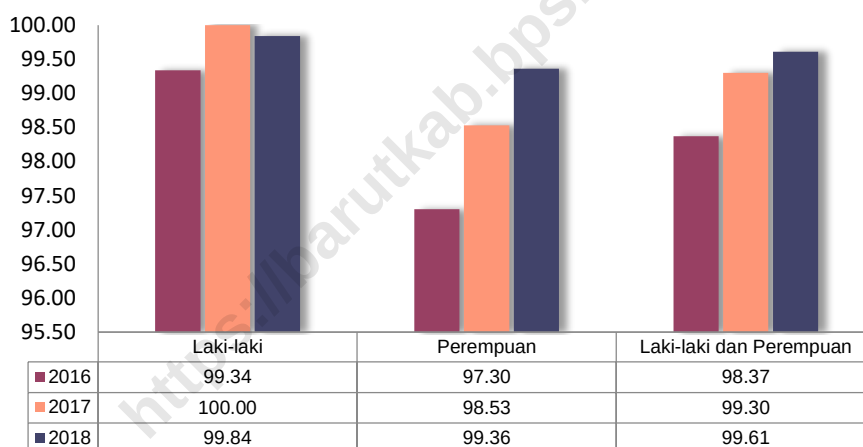
Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, Rasio Murid Guru dan Rasio Guru Sekolah. Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS dan registrasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan.

3.1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) atau *Adult Literacy Rate* didefinisikan sebagai proporsi usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus memahami apa yang dibaca/ditulisnya terhadap total seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas. Seseorang dikatakan melek huruf apabila paling tidak orang tersebut

dapat menggunakan kemampuan baca dan tulis dengan huruf latin dan berhitung dengan angka arab dalam kegiatannya memerlukan kecakapan tersebut dan juga memungkinkannya untuk melanjutkan pemanfaatan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung untuk pengembangan diri dan masyarakat. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

Gambar 3.1 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Utara, 2016-2018



Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2017-2019

Angka Melek Huruf (AMH) penduduk Kabupaten Barito Utara umur 15 tahun ke atas tahun 2018 mencapai 99,61 persen, nilai tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang telah mencapai 99,30 persen. Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2018 nilai AMH penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, yakni 99,84 persen (laki-laki) dan 99,36 persen (perempuan). AMH penduduk laki-laki mengalami penurunan dari sebelumnya mencapai 100 persen pada 2017. Berbeda dengan laki-laki, AMH penduduk perempuan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 98,53 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum, sistem pendidikan dasar semakin efektif di dalam program keaksaraan yang

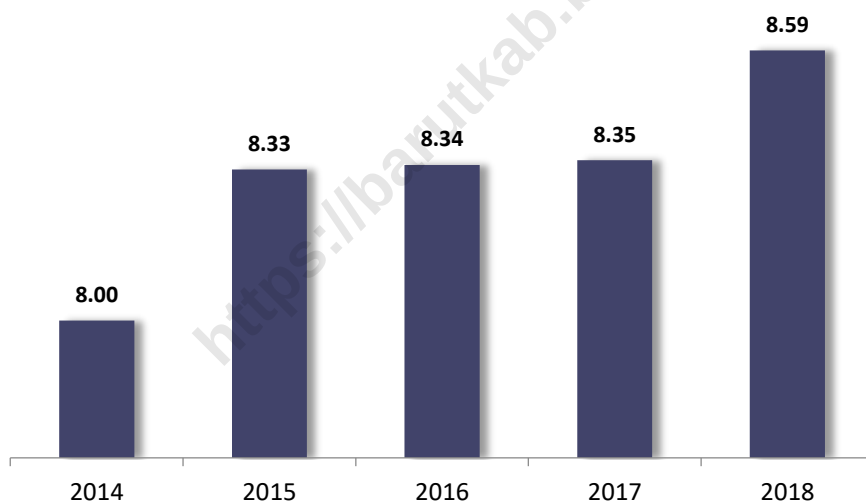
Pendidikan

memungkinkan penduduk untuk mampu menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pendidikannya.

3.2. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan normal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk dari segi pendidikan formal. Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan.

Gambar 3.2 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas di Kabupaten Barito Utara, 2014-2018 (Tahun)



Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2015-2019

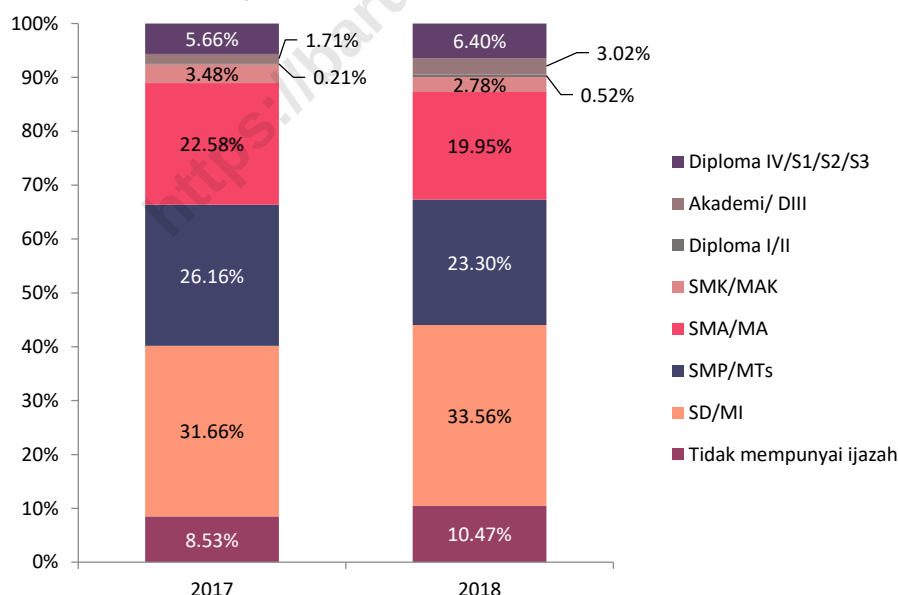
Rata-rata lama sekolah penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2018 sebesar 8,59 tahun. Hal ini berarti rata-rata penduduk Kabupaten Barito Utara baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 2 SMP atau putus sekolah di kelas 3 SMP. Kenaikan pada tahun 2018 cukup signifikan jika dibandingkan tiga tahun sebelumnya yang tidak jauh berubah. Perubahan terbesar selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2015 dengan rata-rata lama sekolah penduduk usia 10 tahun ke atas Kabupaten Barito Utara pada tahun 2015 selama 8,33 tahun, naik dari tahun

2014 dengan rata-rata lama sekolah penduduk usia 10 tahun ke atas Kabupaten Barito Utara selama 8 tahun.

3.3. Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian, keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Hal itu dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang telah ditamatkan. Bagi orang yang menamatkan pendidikan hingga jenjang pendidikan yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan dan keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/ keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Gambar 3.3 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Barito Utara, 2017-2018



Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2018-2019

Pada tahun 2018, sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Barito Utara berpendidikan di bawah SMA Sederajat. Persentase penduduk dengan pendidikan SD/MI yakni mencapai 33,56 persen, yang

Pendidikan

berpendidikan SMP/MTs mencapai 23,30 persen, yang berpendidikan SMA/SMK sebesar 19,95 persen; sedangkan penduduk yang tidak mempunyai ijazah mencapai 10,47 persen. Sementara itu, penduduk yang telah menempuh pendidikan tinggi masih rendah. Dari seluruh jenjang pendidikan tinggi yang ada, jenjang pendidikan DIV/S1/S2/S3 merupakan jenjang pendidikan yang paling banyak ditamatkan, yakni mencapai 6,40 persen.

Persentase penduduk yang tidak memiliki ijazah meningkat di tahun 2018 dari 8,53 persen di tahun 2017 menjadi 10,47 persen di tahun 2018. Sementara itu persentase penduduk yang memiliki ijazah SD/MI, Diploma I/II, Akademi/DIII, dan Diploma IV/S1/S2/S3 meningkat di tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian masyarakat akan pendidikan semakin baik. Dengan demikian diharapkan program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah dapat tercapai.

3.4. Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya, yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap agar kedua indikator pada setiap jenjang pendidikan selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) atau *School Enrollment Rate* didefinisikan sebagai proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) atau *Net Enrollment Rate* didefinisikan sebagai proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Jika APM bernilai 100 berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Sejak tahun 2009, jalur Pendidikan Nonformal yakni Paket A, Paket B, dan Paket C turut

diperhitungkan. Indikator ini dapat menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur.

Tabel 3.1 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Usia Sekolah di Kabupaten Barito Utara, 2017-2018

Jenis Kelamin	7-12 Tahun		13-15 Tahun		16-18 Tahun	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	98,96	100,00	93,84	95,54	73,07	58,30
Perempuan	99,39	100,00	98,12	100,00	65,89	71,83
Laki-laki + Perempuan	99,16	100,00	96,23	97,72	69,79	65,91

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017 dan 2018 (Diolah)

Pada tahun 2018, APS penduduk pada kelompok umur 7-12 tahun sudah mencapai 100,00 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,84 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 99,16 persen, sedangkan nilai APS untuk kelompok umur 13-15 tahun mencapai 96,23 persen, mengalami peningkatan sebesar 1,32 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 94,98 persen. Sementara itu, untuk APS pada kelompok umur 16-18 tahun mencapai 69,79 persen, mengalami peningkatan sebesar 8,13 persen dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 61,66 persen. Nilai APS usia 16-18 tahun pada tahun 2017 dan 2018 terendah diantara kelompok usia yang lain. Nilai APS kelompok umur 16-18 tahun pada tahun 2018 sebesar 65,91 persen berarti bahwa dari setiap 100 penduduk usia 16-18 tahun hanya terdapat 65-66 penduduk yang menempuh pendidikan. Hal ini menandakan bahwa masih banyak anak yang putus sekolah.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, secara umum pada tahun 2018 APS penduduk perempuan terlihat lebih baik jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki, khususnya pada kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Pada kelompok umur 7-12 tahun, pada 2018 sudah mencapai 100 persen, baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan. Apabila ditinjau lebih dalam menurut kelompok umurnya, terjadi kecenderungan bahwa semakin tinggi kelompok umurnya, maka tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan juga semakin tinggi.

Pendidikan

Tabel 3.2 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan di Kabupaten Barito Utara, 2017-2018

Jenis Kelamin	SD		SMP		SMA	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	98,96	100,00	89,55	85,57	63,83	55,41
Perempuan	99,39	100,00	82,87	83,21	62,18	67,74
Laki-laki + Perempuan	99,16	100,00	85,83	84,42	63,08	62,35

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017 dan 2018 (Diolah)

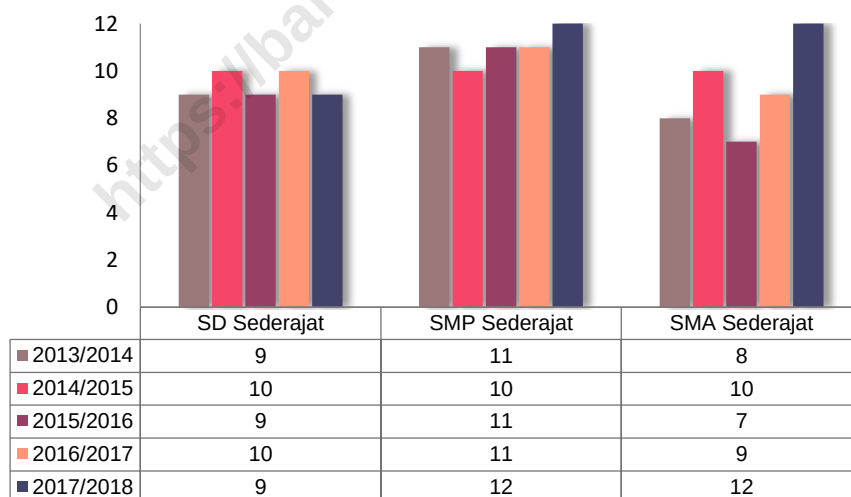
Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang terjadi pada tahun 2018 juga terjadi pada Angka Partisipasi Murni (APM). Pada tahun 2018, nilai APM SD sebesar 100 persen atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 99,16 persen. Berbeda dengan APM SD, nilai APM SMP mengalami penurunan dari 85,83 persen menjadi 84,42 persen. Sama halnya dengan nilai APM SMP, APM SMA juga mengalami penurunan dari 63,08 persen menjadi 62,35 persen. Nilai APM SMA pada tahun 2018 merupakan nilai terendah diantara tingkat pendidikan yang lain. Nilai APM SMA sebesar 62,35 persen berarti bahwa dari setiap 100 penduduk kelompok umur 16-18 tahun atau setara jenjang pendidikan SMA hanya terdapat 62-63 penduduk yang bersekolah tepat waktu atau sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya, yaitu SMA. Hal ini menandakan bahwa masih banyak anak yang sekolah di luar sistem pendidikan yang seharusnya, seperti menunda saat mulai bersekolah, tidak naik kelas, berhenti sekolah untuk sementara waktu atau lulus lebih awal.

3.5. Kualitas Pelayanan Pendidikan

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan yaitu pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan merupakan program utama pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan bangsa. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pendidikan antara lain rasio murid-guru dan rasio guru-sekolah.

Rasio Murid-Guru (*Pupil-Teacher Ratio*) merupakan rata-rata jumlah murid/siswa per guru di tingkat pendidikan tertentu pada tahun ajaran tertentu. Indikator ini dapat digunakan untuk menggambarkan beban kerja seorang guru dalam mengajar dan untuk melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasionya, diduga akan semakin berkurang pengawasan/perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah. Hal ini umumnya diasumsikan bahwa rasio murid-guru yang rendah menandakan kelas yang lebih kecil yang memungkinkan para guru untuk lebih memperhatikan individu siswa, yang mungkin dalam jangka panjang menghasilkan performa yang lebih baik dari murid. Indikator ini tidak memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas belajar/mengajar, seperti perbedaan dalam kualifikasi guru, pelatihan pedagogik, pengalaman dan status, metode pengajaran, kondisi bahan ajar, dan variasi di dalam kelas.

Gambar 3.4 Rasio Murid-Guru di Kabupaten Barito Utara, Tahun Ajaran 2014/2015 s.d. 2018/2019



Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2015-2019

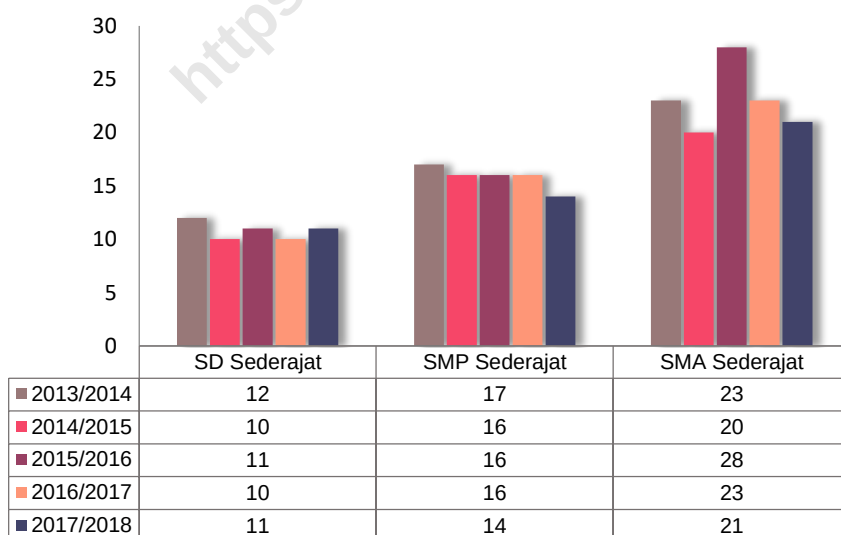
Terjadi peningkatan rasio murid-guru pada tahun ajaran 2017/2018 apabila dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya pada jenjang pendidikan SMP Sederajat dan SMA Sederajat. Nilai rasio murid-guru pada jenjang pendidikan SMP Sederajat tahun ajaran 2016/2017 adalah 11, sementara tahun 2017/2018 mencapai 12. Untuk rasio murid-guru pada

Pendidikan

jenjang pendidikan SMA Sederajat tahun 2016/2017 adalah 9, sementara tahun 2017/2018 mencapai 12. Sementara itu rasio-murid guru untuk jenjang pendidikan SD Sederajat menurun dari 10 menjadi 9 di tahun ajaran 2017/2018. Berdasarkan nilai rasio pada grafik dapat disimpulkan bahwa pada tahun ajaran 2017/2018 rata-rata seorang guru SD Sederajat mengajar 9 murid, seorang guru SMP Sederajat mengajar 12 murid dan seorang guru SMA Sederajat mengajar 12 murid.

Rasio guru per sekolah dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah tenaga pengajar dibandingkan dengan jumlah sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui kekurangan/kelebihan tenaga pengajar yang mengajar di sekolah pada suatu daerah tertentu. Semakin rendah nilai rasio, berarti semakin terbatas jumlah tenaga pengajar yang mengajar di suatu sekolah tertentu. Sebaliknya semakin besar nilai rasio mengindikasikan kemungkinan terjadinya kelebihan tenaga pengajar pada sekolah tersebut. Dengan demikian pemerintah dapat melakukan pemerataan tenaga pengajar misal melalui kebijakan berupa mutasi guru.

Gambar 3.5 Rasio Guru-Sekolah di Kabupaten Barito Utara, Tahun Ajaran 2014/2015-2018/2019



Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2015-2019

Pendidikan

Pada tahun ajaran 2017/2018 rasio guru per sekolah pada jenjang pendidikan SD meningkat, sementara pada SMP dan SMA mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya. Rasio guru per sekolah pada jenjang pendidikan SD Sederajat sebesar 11, SMP Sederajat 14, dan SMA Sederajat 21. Hal ini berarti semakin tinggi jenjang pendidikan semakin tinggi rasio guru per sekolahnya karena terkait dengan jumlah sarana sekolah yang semakin sedikit pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

<https://barutkab.bps.go.id>

4

Ketenagakerjaan

Kabupaten Barito Utara 2018

Distribusi Penduduk yang Bekerja

Pertanian
45,73
persen



Industri
14,37
persen

Jasa-jasa
39,90 persen

Tingkat
Pengangguran
Terbuka
4,34 persen

Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja
73,97 persen



4

KETENAGAKERJAAN

Salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak semakin meluas, yang akan berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi, dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

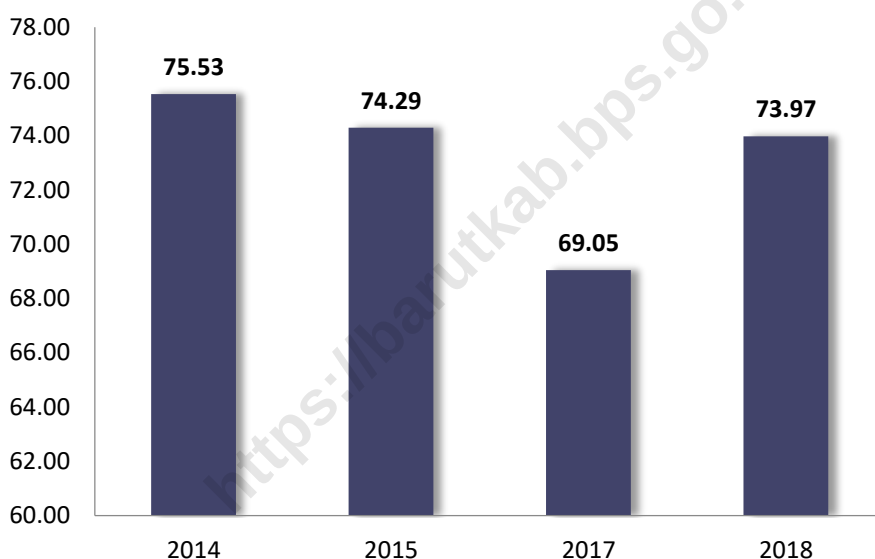
4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur pencapaian dari hasil pembangunan. Di samping itu, TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. Indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Angkatan Kerja (*Labor Force*) sendiri didefinisikan sebagai penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sementara itu, pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang

Ketenagakerjaan

mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Gambar 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Barito Utara, 2014-2018^{*)}



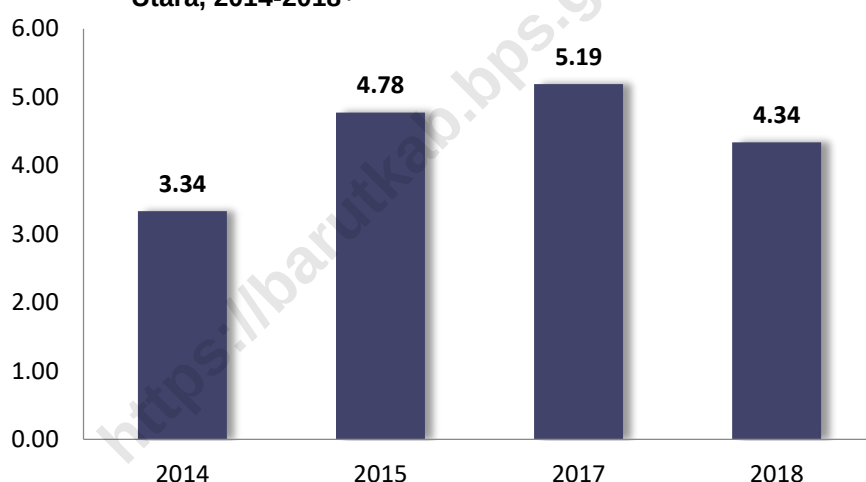
Keterangan: ^{*)} Data tahun 2016 tidak tersedia

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2014-2018 (Diolah)

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2018 mencapai 69.145 orang, bertambah sebanyak 5.441 orang atau sebesar 8,54 persen dibanding tahun 2017. Dengan demikian, dari total jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara berumur 15 tahun keatas yang sebanyak 93.472 orang, sebesar 73,97 persen merupakan angkatan kerja (bekerja dan pengangguran terbuka). Dengan kata lain, partisipasi angkatan kerja Kabupaten Barito Utara tahun 2018 mencapai 73,97 persen dan mengalami kenaikan dari tahun 2017.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Barito Utara mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018 yakni dari 5,19 persen pada tahun 2017 menjadi 4,34 persen pada tahun 2018. Artinya terdapat 4 orang pengangguran dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja). TPT menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap di pasar kerja. Namun, penduduk yang menganggur ini termasuk di dalamnya orang yang bekerja di bawah jam kerja normal. Dengan kata lain, terdapat penduduk yang bekerja namun jam kerjanya kurang dari 35 jam seminggu.

Gambar 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Barito Utara, 2014-2018^{*)}



Keterangan: ^{*)}Data tahun 2016 tidak tersedia

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2014-2018 (Diolah)

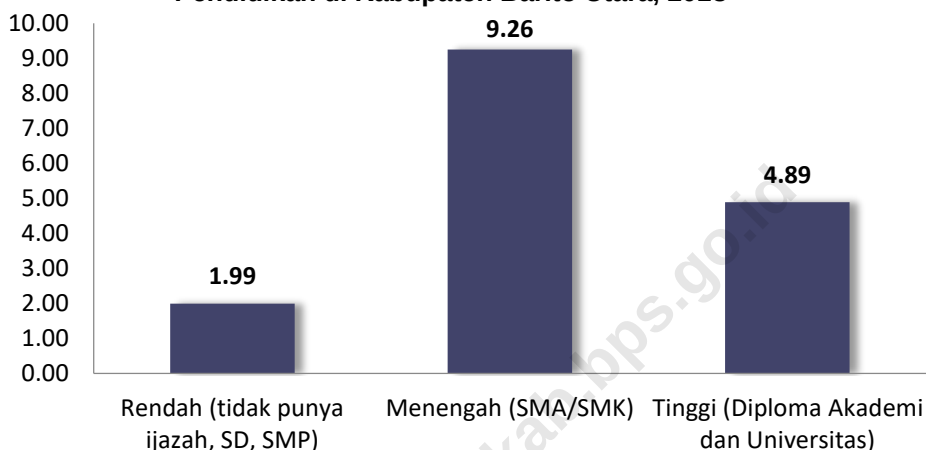
4.2. Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan

Ketenagakerjaan

tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ia tamatkan. Dengan demikian sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi pengangguran.

Gambar 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Barito Utara, 2018



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2018 (diolah)

Apabila dilihat berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, pada tahun 2018 TPT penduduk tertinggi ada pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK). TPT penduduk dengan pendidikan menengah mencapai 9,26 persen. Hal ini berarti dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 9 orang merupakan pengangguran. Sementara itu, TPT penduduk dengan pendidikan tinggi (diploma akademi dan universitas) berada di urutan kedua, yaitu sebesar 4,89 persen. TPT penduduk berpendidikan rendah (tidak punya ijazah, SD, SMP) merupakan TPT terendah yaitu sebesar 1,99 persen.

TPT untuk penduduk yang berpendidikan rendah (tidak punya ijazah, SD, SMP) yang sebesar 1,99 persen disebabkan karena dimungkinkan penduduk dengan pendidikan rendah tidak pilih-pilih jenis pekerjaan mengingat pilihan pekerjaan yang adapun tidak banyak. Berbeda dengan lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang cenderung lebih selektif dalam urusan mencari pekerjaan. Hal ini seiring dengan semakin tingginya ekspektasi penduduk lulusan pendidikan menengah dan tinggi terhadap lapangan kerja.

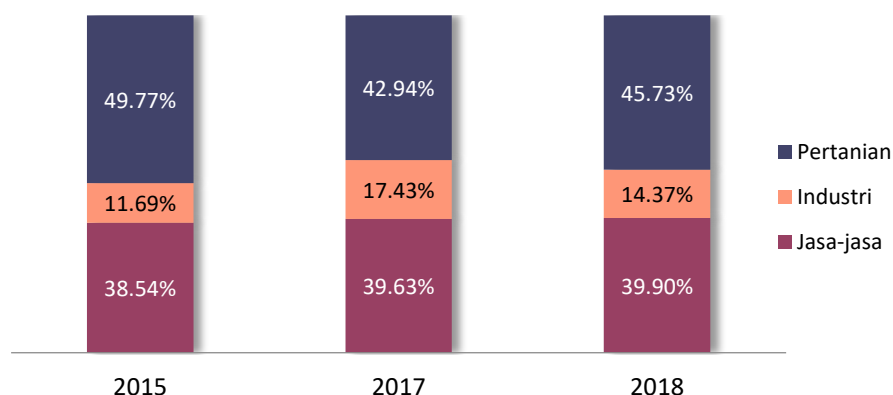
Ketenagakerjaan

Pemerintah perlu melakukan kebijakan guna menurunkan angka angka pengangguran misal dengan merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Kebijakan melalui jalinan kerja sama dengan perusahaan/industri guna meningkatkan peluang kerja terutama bagi lulusan SMA/SMK juga bisa dilakukan. Berbagai kebijakan perlu dilakukan mengingat Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Apabila penduduk usia kerja banyak yang menganggur, maka bonus demografi tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional.

4.3. Lapangan Pekerjaan dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi ke dalam 3 sektor lapangan usaha yakni pertanian yang mencakup pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan; industri yang mencakup pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, dan air serta bangunan/ konstruksi; dan jasa-jasa yang mencakup perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel, angkutan, pergudangan, komunikasi, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan.

Gambar 4.4 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Utara, 2015-2018¹⁾



Keterangan: ¹⁾Data tahun 2016 tidak tersedia

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2018 (diolah)

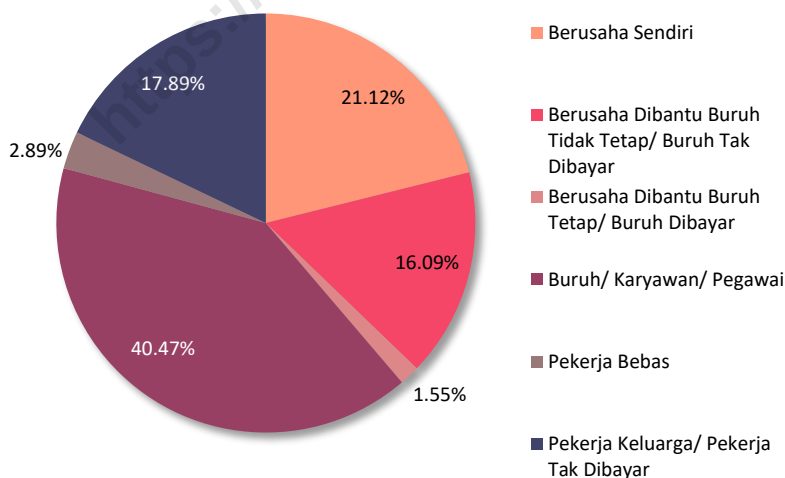
Secara umum sebagian besar penduduk yang bekerja di sektor pertanian tahun 2015 sebesar 49,77 persen. Persentase ini menurun pada

Ketenagakerjaan

tahun 2017 namun kemudian meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi sebesar 45,73 persen. Meskipun demikian, sektor pertanian masih menjadi lapangan usaha utama yang dilakukan oleh penduduk Kabupaten Barito Utara sejak tahun 2015-2018.

Kondisi yang berbeda terjadi pada sektor industri. Persentase penduduk yang bekerja di sektor industri mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi sebesar 17,43 persen namun kembali turun pada tahun 2018 menjadi 14,37 persen. Sementara itu, sektor jasa-jasa terus mengalami peningkatan selama tahun 2015-2018. Penduduk yang bekerja pada sektor jasa-jasa pada tahun 2015 sebesar 38,54 persen meningkat menjadi 39,90 persen pada tahun 2018. Tidak menutup kemungkinan bahwa sektor jasa-jasa akan menjadi lapangan usaha utama penduduk Kabupaten Barito Utara di masa mendatang dan menggeser sektor pertanian sebagai lapangan usaha utama saat ini.

Gambar 4. 5 Komposisi Penduduk Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Barito Utara, 2018



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2018 (diolah)

Mayoritas penduduk yang bekerja di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2018 berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai yaitu sebesar 40,47 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk

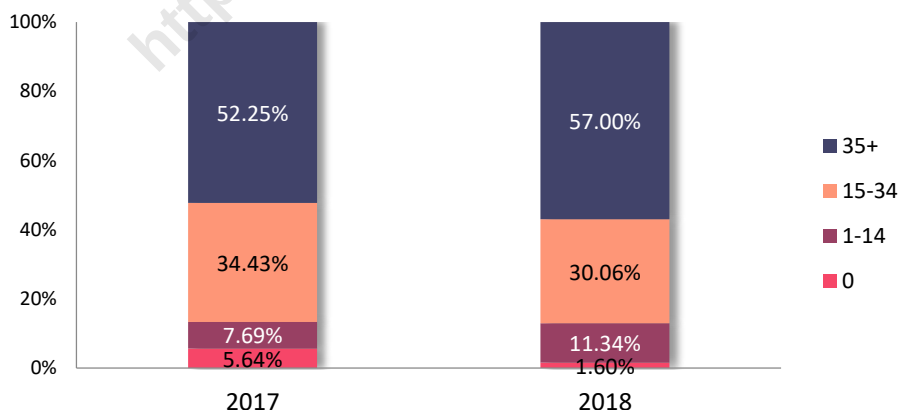
Ketenagakerjaan

di Kabupaten Barito Utara bekerja pada sektor formal. Sementara itu, penduduk bekerja yang berusaha sendiri sebesar 21,12 persen. Hanya sebesar 1,55 persen penduduk bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

4.4. Jumlah Jam Kerja

Dalam kajian ketenagakerjaan, seorang pekerja dapat dikategorikan sebagai pengangguran kentara atau terselubung jika mereka bekerja jauh di bawah jam kerja rata-rata selama seminggu (kurang dari 35 jam). Biasanya pekerja semacam ini memiliki pendapatan di bawah kemampuan sebenarnya. Selain itu, seseorang yang terpaksa bekerja di bawah 35 jam merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian, atau keterampilannya. Sementara itu, seorang pekerja yang dikategorikan sebagai bukan setengah pengangguran adalah mereka yang memiliki jumlah jam kerja normal selama seminggu (minimal 35 jam).

Gambar 4.6 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jam Kerja Selama Seminggu di Kabupaten Barito Utara, 2017-2018



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2018 (diolah)

Secara umum persentase pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu yang lalu pada tahun 2018 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu dari 47,75 persen menjadi 43,00 persen. Di sisi lain, persentase penduduk yang bekerja di atas 35 jam

Ketenagakerjaan

mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 52,25 persen menjadi 57,00 persen. Hal ini dapat disebabkan semakin meningkatnya penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai.

4.5. Upah/Gaji/Pendapatan

Upah/gaji merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja atas jasa yang diberikan dalam proses memproduksi barang atau jasa pada suatu instansi/perusahaan. Upah/gaji yang diterima oleh setiap pekerja digunakan demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya baik untuk kebutuhan dirinya sendiri maupun untuk kebutuhan keluarganya. Seorang pekerja dapat dikatakan hidup layak apabila mendapat upah/gaji yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Tabel 4.1 Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal^{*)} Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Barito Utara, 2018^{)} (Rupiah)**

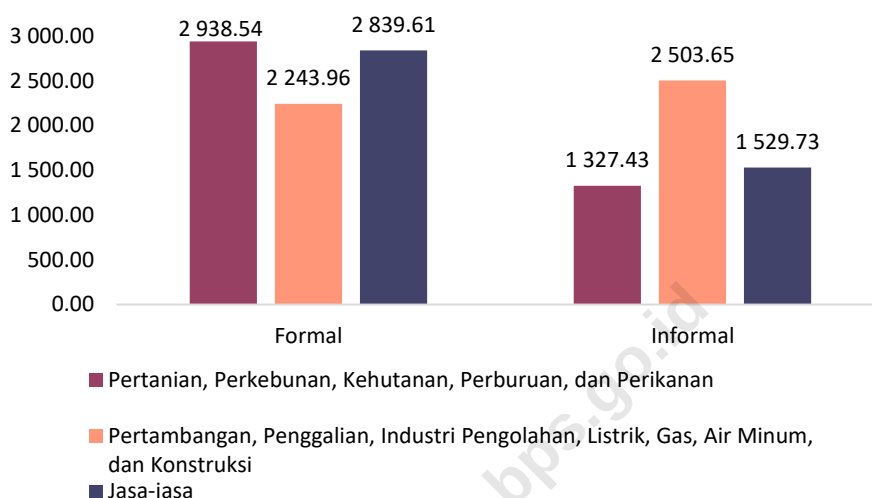
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2018
(1)	(2)
Tidak/Belum Tamat SD	-
SD	1 533 277
SMP	1 457 585
SMA ke atas	1 994 520
Rata-rata	1 573 985

Keterangan : *) Pekerja informal adalah pekerja yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2018 (diolah)

Dilihat dari rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih dalam sebulan menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2018, para pekerja dengan pendidikan SMA ke atas menerima pendapatan bersih sebulan yang paling besar, yaitu mencapai 1.994.520 Rupiah. Para pekerja dengan pendidikan SMP menerima pendapatan bersih sebulan yang paling kecil yaitu sebesar 1.457.585 Rupiah. Sementara itu, pekerja dengan pendidikan SD berada di posisi kedua dengan pendapatan bersih sebulan 1.533.277 Rupiah.

Gambar 4.7 Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Formal dan Informal^{*)} Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Barito Utara, 2018 (Ribu Rupiah)



Keterangan : ^{*)} Pekerja formal adalah buruh/karyawan/pegawai

Pekerja informal adalah pekerja yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non pertanian

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2018 (diolah)

Jika ditinjau dari lapangan pekerjaan utama yang dilakukan oleh penduduk, untuk sektor formal lapangan pekerjaan Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan memberikan pendapatan tertinggi dengan rata-rata pendapatan bersih 2.938.539 Rupiah. Kondisi berbeda ditunjukkan sektor informal. Pada sektor informal, lapangan pekerjaan pertambangan, penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, air minum, dan konstruksi memberikan pendapatan tertinggi dengan rata-rata pendapatan bersih 2.503.647 Rupiah.

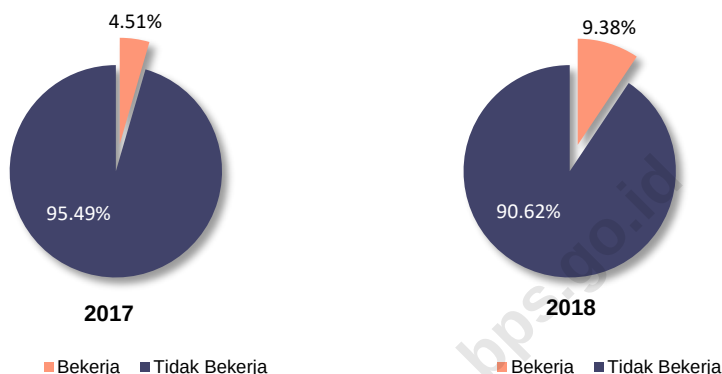
4.6. Pekerja Anak (Usia 10-17 Tahun)

Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat lima hak dasar anak yakni hak untuk hidup layak, hak untuk berkembang, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk berperan, serta hak untuk memperoleh pendidikan. Anak-anak yang dipekerjakan akan terancam kualitas kehidupan, hak-hak, dan masa depannya sebagai generasi penerus masa depan bangsa. Selain itu, kegiatan bekerja dapat menghalangi anak

Ketenagakerjaan

untuk bersekolah dan membahayakan kesehatan fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, masalah pekerja anak menjadi masalah yang serius yang harus dihadapi dan segera diselesaikan.

Gambar 4.8 Persentase Penduduk Umur 10-17 Tahun yang Bekerja di Kabupaten Barito Utara, 2017-2018



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2017 dan 2018 (diolah)

Persentase penduduk usia 10-17 tahun yang bekerja di Kabupaten Barito Utara tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding tahun 2017. Hal ini menandakan bahwa persentase pekerja anak meningkat dari 4,51 persen di tahun 2017 menjadi 9,38 persen di tahun 2018. Meningkatnya jumlah pekerja anak di Kabupaten Barito Utara perlu menjadi perhatian semua pihak walaupun persentasenya masih jauh lebih kecil dibanding anak yang tidak bekerja. Dengan menghabiskan waktu untuk bekerja membuat hak anak, seperti bermain dan belajar bisa terabaikan. Hal ini berpotensi mengganggu pertumbuhan mental, fisik serta sosial anak.

4.7 Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah

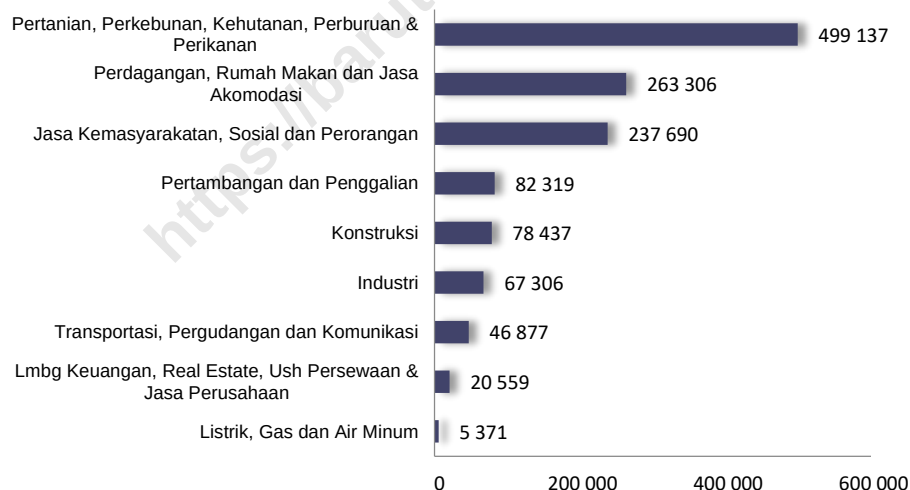
Keadaan ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah bulan Agustus 2018 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk usia kerja dari 1.885 ribu jiwa pada Agustus 2017 menjadi 1.935 ribu jiwa pada Agustus 2018. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja diikuti dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan dari 1.277 ribu jiwa pada Agustus 2017 menjadi 1.355 ribu jiwa pada Agustus 2018. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini berdampak pada meningkatnya Tingkat

Ketenagakerjaan

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 67,74 persen pada Agustus 2017 menjadi 70,03 persen pada Agustus 2018. Ini berarti dari 100 orang penduduk usia kerja, sebanyak 70 orang diantaranya aktif secara ekonomi.

Pada Agustus 2018, lapangan usaha pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu sebanyak 499.137 jiwa atau sekitar 38,36 persen. Selanjutnya tiga lapangan usaha lainnya yang dijadikan sebagai mata pencaharian oleh penduduk Kalimantan Tengah adalah lapangan usaha Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi sebanyak 263.306 jiwa (20,24 persen), lapangan usaha Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan sebanyak 237.690 jiwa (18,27 persen) dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebanyak 82.319 jiwa (6,33 persen). Sementara itu lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja paling sedikit terdapat di sektor lapangan usaha Listrik, Gas dan Air Minum sebanyak 5.371 jiwa (0,41 persen).

Gambar 4.9 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kalimantan Tengah, 2018 (Jiwa)



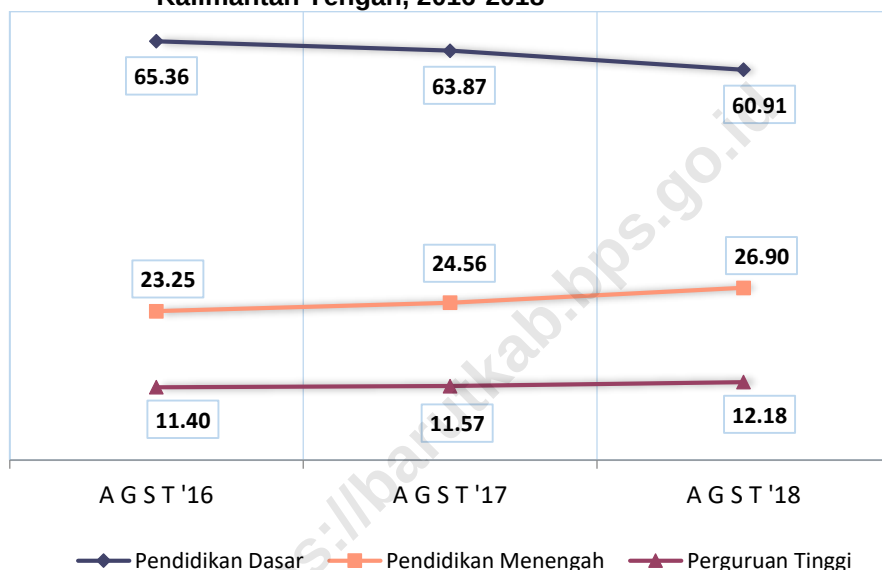
Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2018 (diolah)

Kualitas tenaga kerja salah satunya dapat diukur dari jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Selama tahun 2016-2018 sebagian besar orang yang bekerja di Provinsi Kalimantan Tengah hanya memiliki pendidikan dasar atau setingkat SMP ke bawah. Meski demikian persentase penduduk bekerja dengan pendidikan dasar terus menurun sampai tahun 2018. Pada tahun 2018 sebesar 60,91 persen penduduk yang bekerja hanya

Ketenagakerjaan

memiliki pendidikan dasar. Sementara itu, sebesar 26,90 persen penduduk bekerja berpendidikan menengah (setara SMA) dan 12,18 persen penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma I ke atas). Terjadi peningkatan penduduk bekerja yang berpendidikan menengah dan tinggi pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan semakin baiknya kualitas pekerja di Kabupaten Barito Utara.

Gambar 4.10 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Kalimantan Tengah, 2016-2018



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2016-2018 (diolah)

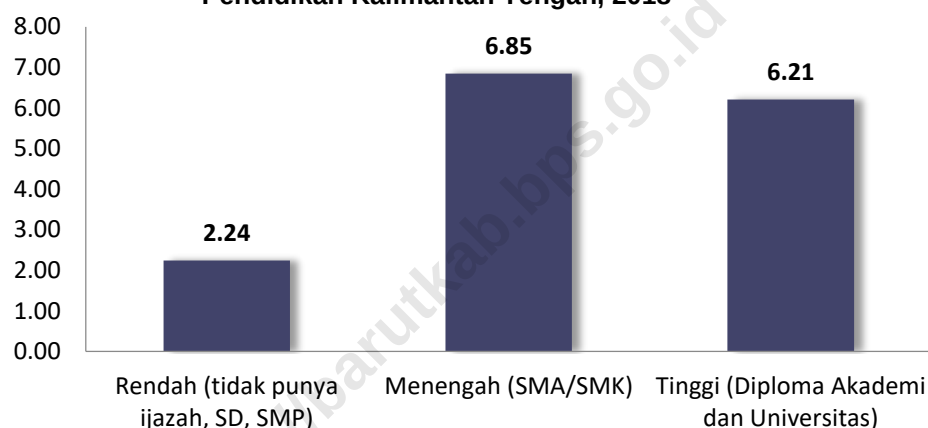
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 mengalami penurunan dibanding tahun 2017 yaitu dari 4,34 persen menjadi 4,01 persen dari sebelumnya 4,82 persen di 2016. Ini artinya bahwa pada tahun 2018 diantara 100 orang di pasar kerja, 4 orang diantaranya tidak memperoleh pekerjaan.

Angka TPT jenjang pendidikan menengah tahun 2018 menurun dibanding tahun 2017, dari 7,52 persen menjadi 6,85 persen. Artinya lapangan pekerjaan untuk pendidikan menengah semakin mudah. Meski demikian, TPT pada tingkat pendidikan menengah bulan Agustus 2018 menjadi TPT tertinggi Provinsi Kalimantan Tengah. Artinya angkatan kerja yang masuk dalam kategori tingkat pendidikan menengah (setara SMA) sepertinya sulit bersaing untuk mendapatkan pekerjaan karena harus bersaing dengan angkatan kerja

Ketenagakerjaan

yang masuk dalam tingkat pendidikan dasar tanpa kualifikasi pendidikan maupun tingkat pendidikan yang lebih tinggi (Diploma Akademi dan Universitas). Untuk pendidikan tinggi atau mereka yang berpendidikan diploma maupun universitas, TPT menunjukkan angka 6,21 persen. Angka ini lebih kecil dibandingkan pendidikan menengah yang artinya lapangan usaha untuk mereka yang berpendidikan tinggi sedikit lebih baik dibanding mereka yang berpendidikan menengah sehingga penyerapan tenaga kerja juga lebih besar.

Gambar 4.11 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Menurut Tingkat Pendidikan Kalimantan Tengah, 2018



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2018 (diolah)

5

Taraf dan Pola Konsumsi

Kabupaten Barito Utara 2018

Rata-rata Konsumsi

Protein Perkapita Perhari

61,62 gram



Rata-rata Konsumsi
Kalori Perkapita Perhari
2080,65 kkal

Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan

Non Makanan
Rp511.136,-
(**45,07** persen)

Makanan
Rp623.031,-
(**54,93** persen)



Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera apabila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non-makanan.

5.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai pendekatan terbaik untuk mengukur pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, kecenderungan pengeluaran untuk bukan makanan juga akan semakin tinggi. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap

Taraf dan Pola Konsumsi

barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Selama periode 2017-2018 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Barito Utara meningkat dari Rp 1.012.802,- menjadi Rp 1.134.167,-. Persentase pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan dari 56,11 persen pada tahun 2017 menjadi 54,93 persen pada tahun 2018. Sebaliknya, pengeluaran bukan makanan mengalami kenaikan dari 43,89 persen di tahun 2017 menjadi 45,07 persen di tahun 2018.

Tabel 5.1 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Utara, 2017-2018

Jenis Pengeluaran	Nominal (Rp)		Persentase (Persen)	
	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Makanan	568 333	623 031	56,11	54,93
2. Bukan Makanan	444 469	511 136	43,89	45,07
a. Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	261 897	319 293	25,86	28,15
b. Aneka Barang dan Jasa	91 256	90 155	5,51	7,95
c. Pakaian, Alas Kaki, Tutup Kepala	19 544	22 724	1,93	2,00
d. Barang yang Tahan Lama	33 549	28 255	3,31	2,49
e. Pajak, Pungutan dan Asuransi	22 315	31 145	2,20	2,75
f. Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	15 908	19 564	1,58	1,72
Jumlah (1+2)	1 012 802	1 134 167	100,00	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017 dan 2018 (Diolah)

Kenaikan pengeluaran di kelompok bukan makanan terjadi di hampir semua jenis pengeluaran kecuali pengeluaran untuk barang yang tahan lama. Jika ditinjau lebih rinci, pengeluaran non-makanan sebagian besar digunakan untuk keperluan perumahan dan fasilitas rumah tangga seperti bahan bakar,

Taraf dan Pola Konsumsi

listrik dan air. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih cenderung membelanjakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Tabel 5.2 Persentase Penduduk Kabupaten Barito Utara Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita, 2017-2018

Golongan Pengeluaran Per Kapita	Persentase Penduduk	
	2017	2018
(1)	(2)	(3)
< 150 000	0,00	0,00
150 000–199 999	0,00	0,00
200 000–299 999	0,42	0,12
300 000–499 999	13,49	13,07
500 000–749 999	32,84	22,22
750 000–999 999	17,52	18,98
1 000 000–1 499 999	18,96	22,35
1 500 000+	16,77	23,26
Total	100,00	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2017-2018

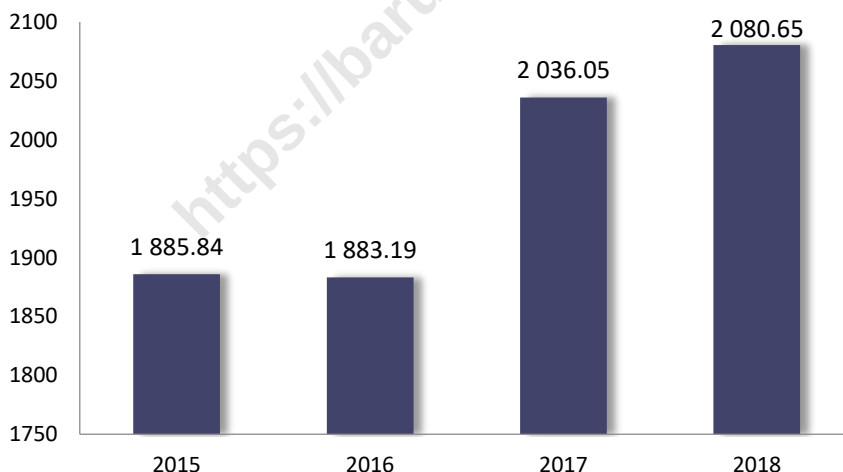
Tabel 5.2 memperlihatkan bahwa selama dua tahun terakhir sebagian besar pengeluaran perkapita perbulan penduduk Kabupaten Barito Utara yang mencakup pengeluaran makanan dan non-makanan berada pada golongan pengeluaran Rp 1.500.000,- ke atas. Persentase penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan untuk makanan dan nonmakanan dengan nilai Rp 1.500.000,- ke atas di tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 16,77 persen dan 23,26 persen. Terlihat bahwa terjadi peningkatan persentase penduduk yang berada di golongan pengeluaran perkapita perbulan Rp 1.500.000,- ke atas. Hal ini juga terjadi pada persentase penduduk dengan golongan pengeluaran perkapita perbulan Rp 750.000,- sampai Rp 999.999,- dan golongan pengeluaran Rp 1.000.000,- sampai Rp 1.499.999,-. Sementara itu, penduduk dengan golongan pengeluaran perkapita perbulan Rp 200.000,- sampai Rp 299.999,-, Rp 300.000,- sampai Rp 499.999,- serta penduduk dengan golongan pengeluaran perkapita perbulan Rp 500.000,- sampai Rp 749.999,- yang justru mengalami penurunan di tahun 2018. Hal ini menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya semakin baik.

Taraf dan Pola Konsumsi

5.2. Konsumsi Energi dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein.

Gambar 5.1 Rata-Rata Konsumsi Kalori Perkapita per Hari di Kabupaten Barito Utara, 2015-2018 (kkal)



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2015-2018

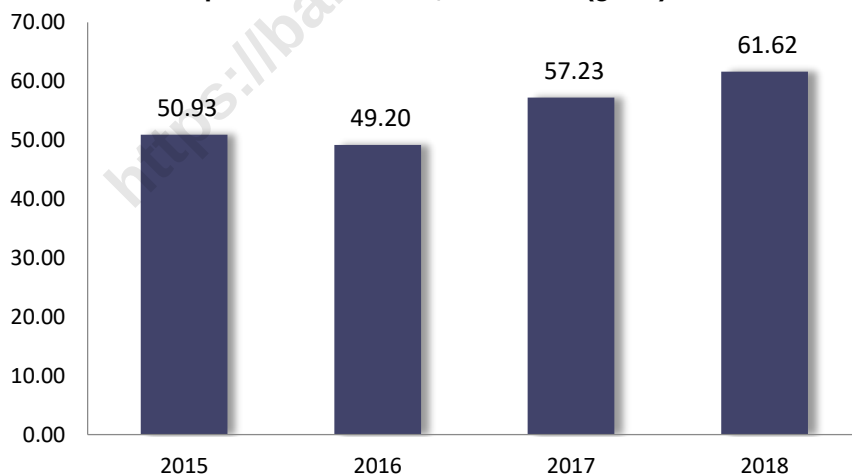
Secara umum, selama tahun 2015-2018 konsumsi kalori perhari penduduk Kabupaten Barito Utara masih di bawah syarat kecukupan gizi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, yaitu 2.150 kkal/hari. Rata-rata konsumsi kalori penduduk Barito Utara selama 2015-2018 berkisar 1.885,84 kkal/hari sampai 2.080,65 kkal/hari. Rata-rata konsumsi kalori perkapita

Taraf dan Pola Konsumsi

penduduk Kabupaten Barito Utara selama tahun 2015-2018 cenderung meningkat meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2016.

Pada tahun 2016 rata-rata konsumsi kalori penduduk Kabupaten Barito Utara mengalami penurunan. Rata-rata konsumsi kalori pada tahun tersebut mencapai 1.883,19 kkal/hari. Namun pada tahun 2017 rata-rata konsumsi kalori perkapita penduduk Kabupaten Barito Utara kembali meningkat menjadi 2.036,05 kkal/hari. Peningkatan rata-rata konsumsi kalori terus berlanjut pada tahun 2018 mencapai 2.080,65 kkal/hari. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan kalori perkapita penduduk Kabupaten Barito Utara semakin baik. Meski demikian, pemerintah dan masyarakat tetap harus berupaya meningkatkan kebutuhan akan kalori ini mengingat angka ini masih di bawah syarat kecukupan gizi. Ketika kebutuhan tubuh akan kalori masih belum cukup terpenuhi akan berdampak pada tidak optimalnya aktivitas yang dijalankan oleh seorang individu.

Gambar 5.2 Rata-Rata Konsumsi Protein Perkapita per Hari di Kabupaten Barito Utara, 2015-2018 (gram)



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2015-2018

Kondisi yang berbeda terjadi pada konsumsi protein perkapita penduduk Barito Utara. Selama tahun 2015-2016, rata-rata konsumsi protein penduduk Barito Utara masih di bawah syarat kecukupan gizi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, yaitu 57 gram/hari. Namun pada tahun 2017, syarat kecukupan gizi telah tercapai. Pada tahun 2015 konsumsi protein

Taraf dan Pola Konsumsi

perkapita penduduk Kabupaten Barito Utara baru mencapai 50,93 gram perhari. Pada tahun 2016, kondisi konsumsi protein mengalami penurunan dibanding tahun 2015. Pada tahun tersebut konsumsi protein penduduk Kabupaten Barito Utara mencapai 49,20 gram atau mengalami penurunan 3,40 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu konsumsi protein perkapita tahun 2017 sebesar 57,23 gram perhari. Nilai ini meningkat sebesar 16,32 persen jika dibandingkan dengan konsumsi protein perkapita tahun 2016. Kondisi ini terus berlanjut di tahun 2018 di mana konsumsi protein perkapita naik hingga mencapai 61,62 gram. Hal ini menandakan bahwa kebutuhan penduduk akan kecukupan protein sesuai dengan syarat kecukupan gizi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yaitu 57 gram perhari telah terpenuhi dan terus meningkat.

6

Perumahan dan Lingkungan

Kabupaten Barito Utara 2018



Sumber Penerangan
Berupa Listrik
95,48 persen

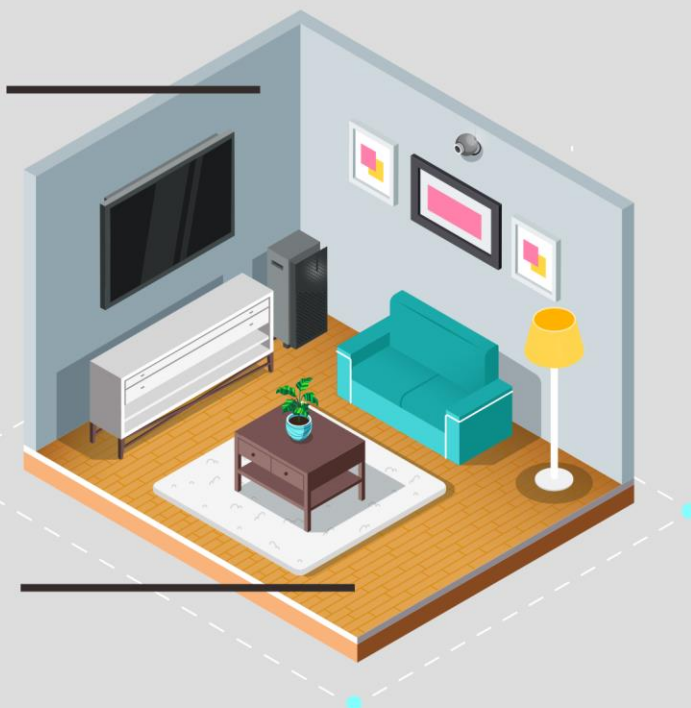


Air Minum Bersih
74,79 persen

Kualitas Perumahan

Dinding Rumah
Terluas Kayu
81,82 persen

Lantai Rumah
Bukan Tanah
100 persen



Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketentraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari, dan berkelanjutan (Kep.Men.No.9 Tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No.4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman, yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah.

Perumahan dan Lingkungan

Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding, dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

6.1. Kualitas Rumah Tinggal

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa di antaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Berdasarkan data Susenas 2018, persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantaikan bukan tanah menunjukkan adanya peningkatan, bahkan semua rumah sudah tidak berlantaikan tanah. Umumnya lantai yang digunakan berupa kayu, yakni mencapai 75,31 persen, menurun dari tahun 2017 yang sebesar 85,28 persen. Kondisi ini juga lebih kecil dari tahun 2016 yang mencapai 77,19 persen.

Tabel 6.1 Karakteristik Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Barito Utara, 2016-2018

Indikator Kualitas Perumahan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Lantai bukan tanah (Persen)	99,40	99,66	100,00
Lantai berupa kayu (Persen)	77,19	85,28	75,31
Atap beton, genteng, dan asbes (Persen)	17,91	20,47	16,93
Dinding terluas kayu (Persen)	82,29	89,22	81,82

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016-2018 (Diolah)

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Dari hasil Susenas

Perumahan dan Lingkungan

2018, rumah tinggal dengan atap beton, genteng, dan asbes pada tahun 2017 mencapai 20,47 persen dan pada tahun 2018 menurun menjadi 16,93 persen. Bangunan rumah tinggal yang menggunakan dinding terluas kayu juga mengalami penurunan dari 89,22 persen menjadi 81,82 persen.

6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Pada tahun 2018, persentase rumah tangga di Kabupaten Barito Utara yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air ledeng sebagai sumber air minum mencapai 56,38 persen. Persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dari 69,08 persen pada tahun 2017 menjadi 74,79 persen pada tahun 2018.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Barito Utara, 2016-2018 (Persen)

Fasilitas Perumahan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Air kemasan, air isi ulang dan ledeng	51,24	75,22	56,38
Air minum bersih ^{*)}	66,49	69,08	74,79
Jamban Sendiri	67,79	71,90	75,99
Tempat pembuangan tinja berupa tangki/SPAL	43,50	51,81	54,60
Sumber penerangan berupa listrik	88,57	95,44	95,48

Keterangan : ^{*)} Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, air isi ulang sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik) > 10 m

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016-2018 (Diolah)

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan

Perumahan dan Lingkungan

terutama tanah dan sumber air. Selain itu juga akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti *thypus*, disentri, kolera, dan sebagainya. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Selama tahun 2016-2018, persentase rumah tangga di Kabupaten Barito Utara yang memiliki jamban sendiri mengalami peningkatan dari 67,79 persen menjadi 75,99 persen. Selain kepemilikan jamban sendiri, penggunaan jamban dengan tangki septik juga merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi rumah tangga dalam memenuhi salah satu kriteria rumah sehat. Pada tahun 2018 rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik baru mencapai 54,60 persen. Penggunaan jamban dengan tangki septik di tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang baru mencapai 51,81 persen.

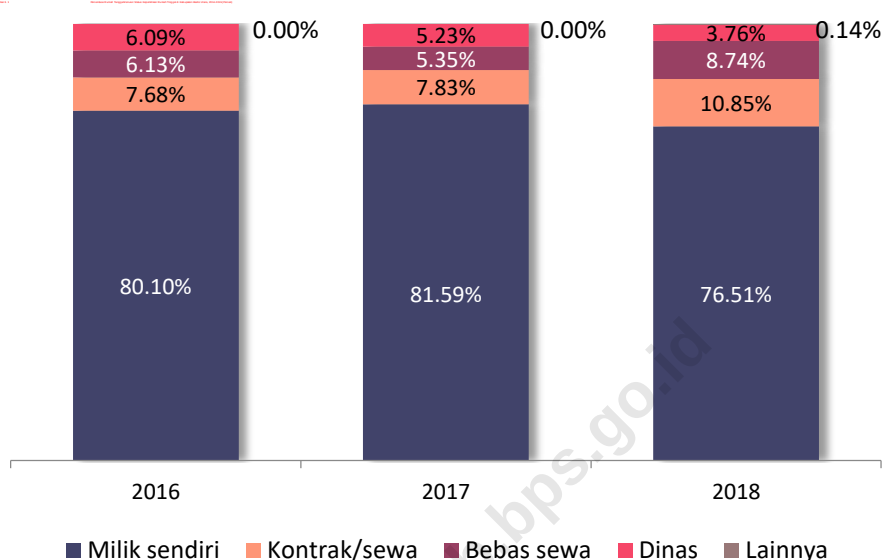
Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non-PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2018, persentase rumah tangga yang telah menikmati fasilitas penerangan listrik meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari 95,44 persen menjadi 95,48 persen.

6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga (RT) sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara, atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Perumahan dan Lingkungan

Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Barito Utara, 2016-2018



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016-2018 (Diolah)

Berdasarkan hasil Susenas 2018, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 76,51 persen. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri tahun sebelumnya yaitu sebesar 81,59 persen. Sisanya sebesar 23,49 persen adalah rumah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari kontrak/sewa sebesar 10,85 persen; bebas sewa sebesar 8,74 persen; rumah dinas sebesar 3,76 persen; dan lainnya 0,14 persen.

7

Kemiskinan

Kabupaten Barito Utara 2018

Persentase
Penduduk Miskin
5 persen

Jumlah
Penduduk Miskin
6,50 ribu Jiwa



Garis Kemiskinan
Rp 450.936,-

Karakteristik Kemiskinan

Tamat SD/SLTP
74,77 persen



Pekerja
Sektor Informal
46,91 persen



Menggunakan Sumber
Air Minum Layak
61,39 persen

Pengeluaran Perkapita
Untuk Makanan
63,37 persen



Penerima
Raskin/Ranstra
13,89 persen

7

KEMISKINAN

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran. Kemiskinan merupakan masalah multi dimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap negara, termasuk Indonesia.

Angka kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini disebabkan beberapa kebijakan yang sebenarnya ditujukan untuk menekan angka kemiskinan, justru lebih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi. Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

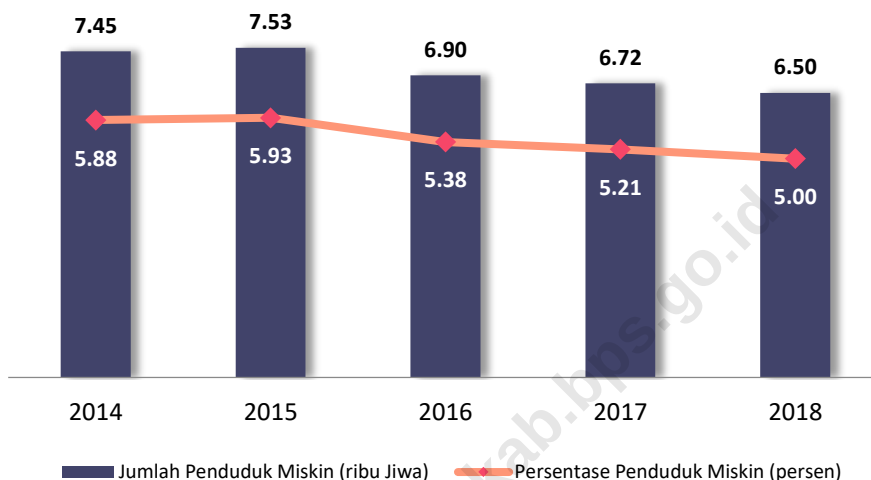
7.1. Perkembangan Penduduk Miskin

Penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Untuk tahun 2018, penduduk Barito Utara yang termasuk dalam kategori penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah 450.936 rupiah. Pada tahun tersebut, jumlah penduduk miskin di Barito Utara mengalami penurunan dari 6,72 ribu jiwa pada tahun 2017 menjadi 6,50 ribu jiwa pada tahun 2018. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2014, jumlah penduduk miskin Barito Utara tahun 2018 mengalami penurunan dari 7,45 ribu jiwa pada tahun 2014. Selama periode 2014-2018, jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 merupakan yang

Kemiskinan

tertinggi, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 6,50 ribu jiwa.

Gambar 7. 1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Barito Utara, 2014-2018



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014-2018 (Diolah)

Persentase penduduk miskin selama lima tahun terakhir cenderung menurun meski pada tahun 2015 sempat meningkat. Selama tahun 2014-2018 persentase penduduk miskin terendah terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 5,00 persen. Apabila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018, persentase penduduk miskin di Kabupaten Barito Utara 0,17 persen lebih rendah dibandingkan persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah (5,17 persen).

7.2. Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Ada 3 (tiga) indikator kemiskinan makro yang dapat digunakan sebagai ukuran kondisi kemiskinan suatu daerah. Ketiga indikator itu adalah persentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Persentase penduduk miskin atau *Head Count Index* ialah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Garis kemiskinan non-makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Pada tahun 2018, garis kemiskinan Barito Utara mencapai 450.936 rupiah, mengalami peningkatan sebesar 0,92 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang telah mencapai 446.807 rupiah. Sementara itu, jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2014, garis kemiskinan Barito Utara tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan yakni sebesar 17,02 persen, dari 385.348 rupiah pada tahun 2014.

Tabel 7.1 Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Rp/Kapita/bulan) di Kabupaten Barito Utara, 2014-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Garis Kemiskinan (Rp)	385 348	408 241	420 100	446 807	450 936
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,68	0,88	0,71	0,55	0,59
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,13	0,25	0,15	0,10	0,10

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014-2018 (Diolah)

Selain garis kemiskinan, rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan perlu diperhatikan. Ukuran yang digunakan untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan disebut Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) atau *Poverty Gap Index*. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Nilai indeks kedalaman kemiskinan Barito Utara tahun 2018 meningkat sebesar 0,04 poin dari 0,55 menjadi 0,59. Peningkatan nilai P1 menunjukkan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin besar. Artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis

Kemiskinan

kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk miskin semakin sulit untuk keluar dari kemiskinan.

Ukuran lain yang digunakan untuk melihat kondisi kemiskinan adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Nilai indeks keparahan kemiskinan Barito Utara tahun 2018 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,10. Jika melihat periode tahun 2013 sampai 2018, nilai indeks keparahan kemiskinan berfluktuasi namun cenderung turun. Kondisi ini menggambarkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin rendah.

7.3. Karakteristik Rumah Tangga Miskin

Pada subbab berikut ini akan dibahas karakteristik rumah tangga miskin di Kabupaten Barito Utara ditinjau dari sisi pendidikan, ketenagakerjaan, pengeluaran perkapita, kesehatan, fasilitas perumahan, dan program pemerintah.

1. Pendidikan

Pada tahun 2018, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Barito Utara sebagian besar tamat SD/SLTP yaitu mencapai 74,77 persen. Sementara itu sebesar 15,49 persen penduduk miskin berpendidikan SLTA Sederajat ke atas dan 9,72 persen penduduk miskin berpendidikan di bawah SD Sederajat. Pada tahun 2018, angka melek huruf penduduk miskin usia 15-24 tahun telah mencapai 100,00 persen. Begitu pula untuk penduduk usia 15-55 tahun angka melek huruf juga telah mencapai 100 persen. Adapun angka partisipasi sekolah untuk penduduk miskin usia 7-12 tahun mencapai 100 persen dan angka partisipasi sekolah untuk penduduk miskin usia 13-15 tahun mencapai 83,47 persen. Hal ini menandakan bahwa seluruh penduduk miskin usia 7-12 tahun bersekolah. Sementara itu untuk penduduk miskin usia 13-15 tahun sebesar 16,53 persen tidak bersekolah. Angka partisipasi sekolah penduduk miskin Kabupaten Barito Utara masih di

bawah angka partisipasi sekolah penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Ketenagakerjaan

Jika dilihat menurut status bekerja, sebagian besar penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Barito Utara tahun 2018 bekerja di sektor informal, yaitu mencapai 46,91 persen. Sementara itu sebesar 15,59 persen penduduk miskin bekerja di sektor formal dan 37,50 persen penduduk miskin tidak bekerja. Apabila ditinjau menurut sektor lapangan usaha tempat bekerja, sebagian besar penduduk miskin Barito Utara bekerja pada sektor non pertanian dibanding sektor pertanian. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Barito Utara yang bekerja di sektor nonpertanian mencapai 57,17 persen sementara di sektor pertanian mencapai 5,33 persen. Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran sektor lapangan usaha utama yang digeluti oleh penduduk miskin di Kabupaten Barito Utara.

3. Pengeluaran Per Kapita

Persentase pengeluaran perkapita penduduk miskin sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dibanding nonmakanan. Pada tahun 2018, persentase pengeluaran perkapita penduduk miskin di Kabupaten Barito Utara untuk makanan mencapai 63,37 persen, sedangkan sisanya yakni 36,63 persen digunakan untuk memenuhi kebutuhan nonmakanan.

4. Kondisi Perumahan

Pada tahun 2018, sebagian besar penduduk miskin di Kabupaten Barito Utara telah menggunakan sumber air minum yang layak. Sumber air minum yang layak adalah air leding eceran/meteran, air hujan, dan pompa/sumur terlindung/mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja 10 meter ke atas. Persentase penduduk miskin yang telah menggunakan sumber air minum layak mencapai 61,39 persen. Selain itu, lebih dari setengah penduduk miskin di Kabupaten Barito Utara juga menggunakan fasilitas tempat buang air besar atau jamban sendiri atau

Kemiskinan

bersama yang layak. Persentase penduduk miskin yang menggunakan jamban sendiri atau bersama mencapai 50,67 persen.

5. *Program Pemerintah*

Instrumen utama penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melalui Program Beras Miskin (Raskin) atau Beras Sejahtera (Rastra). Persentase rumah tangga miskin di Kabupaten Barito Utara yang menerima Program Raskin/ Rastra pada tahun 2016 sebesar 13,89 persen. Rata-rata raskin/rastra yang diterima oleh rumah tangga miskin adalah 15 kilogram dengan harga 3.238 rupiah per kilogram.

8

Sosial Lainnya

Kabupaten Barito Utara 2018

Akses Komputer
15,47 persen

Akses Internet
32,70 persen

Akses Telepon Rumah
0,91 persen

Akses Telepon Seluler
78,95 persen



8

SOSIAL LAINNYA

Aspek sosial seperti akses pada teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi salah satu indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Perkembangan gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon seluler pintar dan komputer. Jenis akses dan media informasi yang beragam tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengikuti tren gaya hidup modern. Semakin terjangkaunya harga telepon pintar dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang mereka inginkan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti kredit usaha dan pelayanan kesehatan gratis, serta tingkat keamanan wilayahnya. Semakin besar masyarakat mendapatkan pelayanan kredit usaha semakin mempermudah masyarakat untuk meningkatkan aktivitas usahanya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kesehatan gratis menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu. Dengan pelayanan kesehatan gratis tersebut masyarakat dapat mengalihkan pendapatannya pada keperluan hidup lainnya guna meningkatkan kesejahteraannya.

Rasa aman dan adanya perlindungan dari negara terhadap masyarakat dari gangguan dan ancaman kejahatan diperlukan oleh masyarakat agar dapat beraktivitas dan bekerja. Semakin rendah tingkat kejahatan di suatu wilayah menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah tersebut.

8.1. Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi

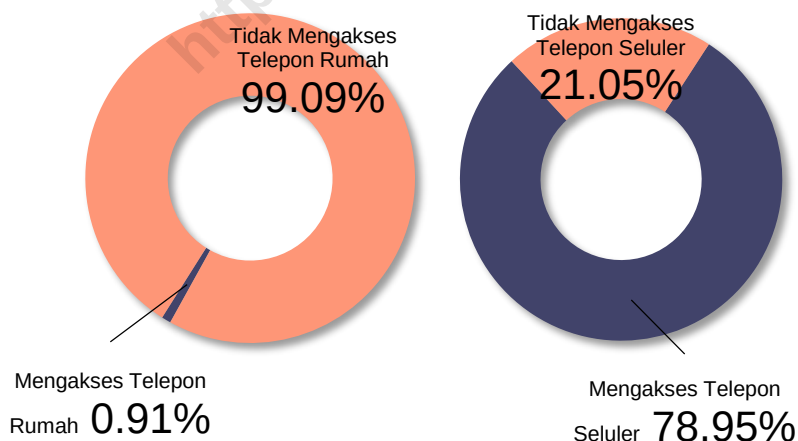
Perkembangan telepon seluler cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon rumah. Pesatnya

Sosial Lainnya

perkembangan teknologi telepon seluler membuat telepon rumah semakin ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan telepon rumah dan meningkatnya kepemilikan telepon seluler. Penggunaan telepon rumah yang mengharuskan seseorang berada di posisi tertentu yang terpasang jaringan telepon semakin ditinggalkan masyarakat karena dianggap kurang efisien dalam mendukung mobilitas penggunaanya.

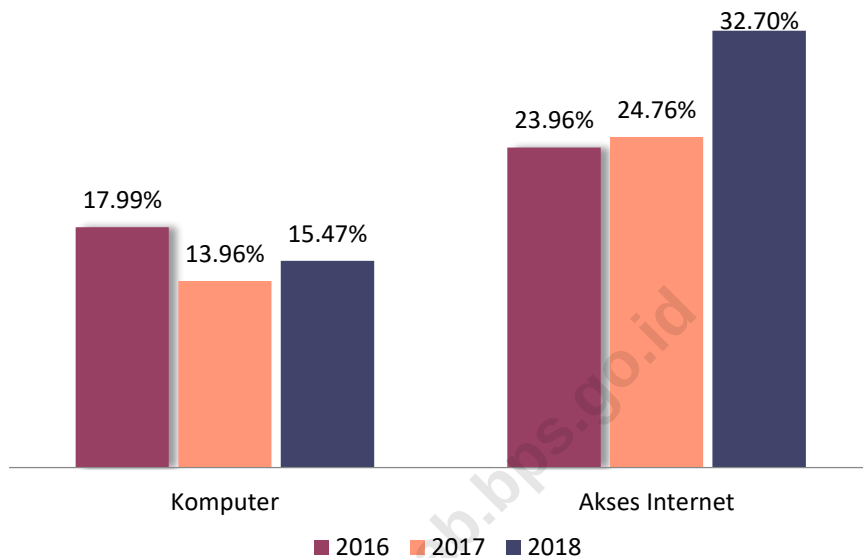
Secara umum jumlah rumah tangga yang menggunakan telepon rumah pada tahun 2018 meningkat dari tahun sebelumnya dari 0,82 persen menjadi 0,91 persen. Masyarakat kini cenderung lebih memilih menggunakan telepon seluler sebagai alat komunikasi karena dinilai lebih praktis, dapat memiliki privasi serta tersedia berbagai fitur canggih penunjang kebutuhan masyarakat akan teknologi yang semakin berkembang seperti mengakses internet, menyimpan foto, audio, video dan sebagainya. Hal ini menjadikan penggunaan telepon seluler sebagai akses komunikasi semakin besar. Penggunaan telepon seluler pada tahun 2018 meningkat dibanding tahun sebelumnya dari 68,45 persen menjadi 78,95 persen.

Gambar 8.1 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Terhadap Telepon Rumah dan Telepon Seluler di Kabupaten Barito Utara, 2018



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018 (Diolah)

Gambar 8.2 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Terhadap Komputer dan Internet di Kabupaten Barito Utara, 2016-2018



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016-2018 (Diolah)

Pada tahun 2018 akses terhadap media komputer sebesar 15,47 persen naik dari tahun 2017. Hal ini juga terjadi pada persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap internet yang justru meningkat. Pada tahun 2018, secara umum terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang mengakses internet dari 24,76 persen pada tahun 2017 menjadi 32,70 persen pada tahun 2018.

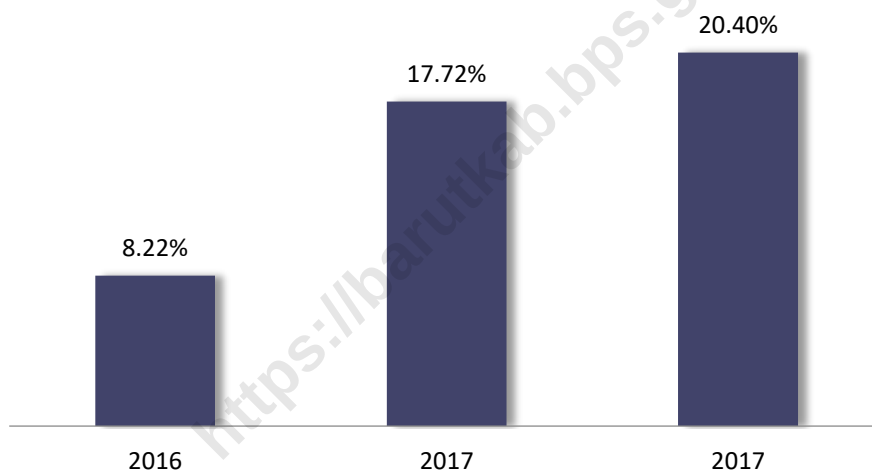
Aplikasi terhadap teknologi komunikasi dan informasi salah satunya melalui akses internet. Media internet digunakan karena memiliki sifat instan, interaktif, dan menarik. Peningkatan akses terhadap internet sejalan dengan peningkatan akses terhadap telepon seluler. Hal ini dimungkinkan terjadi karena masyarakat saat ini cenderung menggunakan telepon seluler sebagai media komunikasi seperti *chatting*, *browsing* atau kegiatan serupa lainnya dengan memanfaatkan akses internet juga.

Sosial Lainnya

8.2. Pemberian Kredit Usaha

Aliran dana ke masyarakat berupa kredit usaha yang berdampak kepada pergerakan ekonomi rakyat akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun bentuk-bentuk pelayanan pemberian kredit usaha kepada masyarakat dapat berasal dari pemerintah, perbankan, lembaga keuangan lainnya maupun perorangan. Pemberdayaan dalam bentuk pemberian kredit usaha ini akan mendukung peningkatan pendapatan, produktivitas, dan penyediaan lapangan kerja.

Gambar 8.3 Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha di Kabupaten Barito Utara, 2016-2018



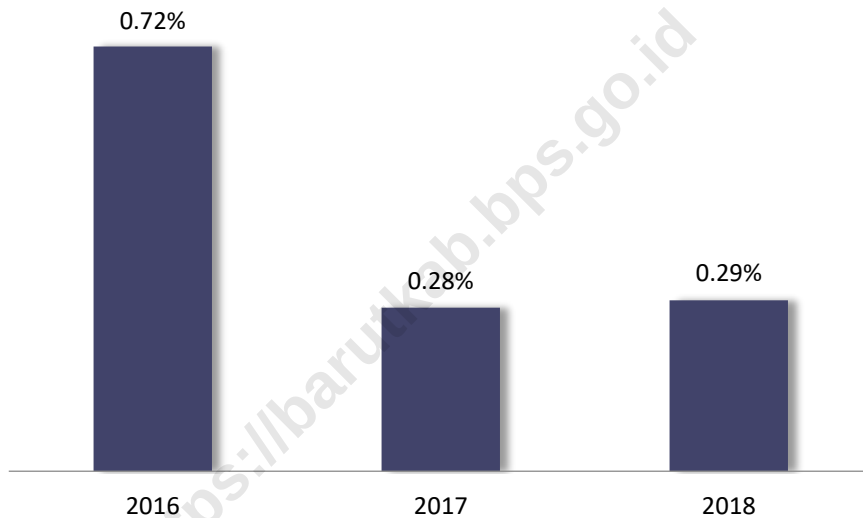
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016-2018 (Diolah)

Beberapa contoh program pemberian kredit usaha dari pemerintah diantaranya KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang diberikan oleh beberapa bank terpilih dan PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, Perkotaan, Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. Jenis program penyaluran yang lainnya seperti KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi), KPEN-RP (Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan, dan KKPE (Kredit Ketahanan Pangan Energi). Pada tahun 2018 rumah tangga penerima kredit usaha meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 17,72 persen pada tahun 2017 menjadi 20,40 persen pada tahun 2018.

8.3. Tindak Kejahatan

Selain bantuan kredit usaha rakyat, tingkat keamanan wilayah juga dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat. Tingginya persentase korban tindak kejahatan mengindikasikan masih kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak kejahatan.

Gambar 8.4 Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan di Kabupaten Barito Utara, 2016-2018



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016-2018 (Diolah)

Selama tahun 2016-2018 penduduk yang menjadi korban kejahatan mengalami penurunan dari 0,72 persen pada tahun 2016 menjadi 0,29 persen pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa selama satu tahun terakhir, tingkat keamanan di Kabupaten Barito Utara semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2011). *Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial*, Katalog BPS Nomor 9201008. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2014). *Pedoman Pembuatan Publikasi BPS Katalog BPS Nomor 1303004*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2015). *Kabupaten Barito Utara Dalam Angka 2015 Katalog BPS Nomor 1102001.6205*. Muara Teweh: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara.
- _____. (2015). *Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Tahun 2010-2020 Provinsi Kalimantan Tengah*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2016). *Kabupaten Barito Utara Dalam Angka 2016 Katalog BPS Nomor 1102001.6205*. Muara Teweh: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara.
- _____. (2017). *Kabupaten Barito Utara Dalam Angka 2017 Katalog BPS Nomor 1102001.6205*. Muara Teweh: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara.
- _____. (2018). *Kabupaten Barito Utara Dalam Angka 2018 Katalog BPS Nomor 1102001.6205*. Muara Teweh: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara.
- _____. (2019). *Kabupaten Barito Utara Dalam Angka 2019 Katalog BPS Nomor 1102001.6205*. Muara Teweh: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara.
- _____. (2019). *Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2019 Katalog BPS Nomor 1102001.62*. Palangka Raya: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
- _____. (2019). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Utara 2018 Katalog BPS Nomor 4101002.6205*. Muara Teweh: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara.
- _____. (2019). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah 2018 Katalog BPS Nomor 4101002.62*. Palangka Raya: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
- _____. (2019). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2018 Katalog BPS Nomor 3205014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

DAFTAR LAMPIRAN



Lampiran 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara, 2014-2018 (Jiwa)

Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Montallat	11 035	11 121	11 202	11 280	11 344
Gunung Timang	10 395	10 467	10 531	10 594	10 643
Gunung Purei	2 514	2 531	2 547	2 562	2 574
Teweh Timur	6 006	6 047	6 085	6 121	6 150
Teweh Tengah	43 812	44 176	44 519	44 849	45 127
Teweh Baru	17 468	17 613	17 750	17 882	17 993
Teweh Selatan	13 134	13 243	13 346	13 445	13 528
Lahei	12 222	12 305	12 382	12 456	12 515
Lahei Barat	9 908	9 976	10 038	10 098	10 145
Barito Utara	126 494	127 479	128 400	129 287	130 019

Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2019

**Lampiran 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di
Kabupaten Barito Utara, 2014-2018 (Jiwa)**

Kelompok Umur	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0-4	12 469	12 461	12 337	12 206	12 059
5-9	12 844	12 675	12 605	12 536	12 466
10-14	12 347	12 331	12 258	12 211	12 156
15-19	11 077	10 973	10 925	10 845	10 756
20-24	10 199	10 073	9 959	9 857	9 741
25-29	11 041	11 003	10 943	10 876	10 804
30-34	11 362	11 357	11 356	11 330	11 264
35-39	11 473	11 560	11 598	11 650	11 681
40-44	9 942	10 304	10 644	10 931	11 167
45-49	7 904	8 201	8 502	8 803	9 090
50-54	5 621	5 867	6 101	6 347	6 598
55-59	3 820	4 012	4 217	4 416	4 608
60-64	2 697	2 857	3 027	3 213	3 404
65-69	1 714	1 801	1 882	1 972	2 074
70-74	1 013	1 028	1 059	1 099	1 145
75+	971	976	987	995	1 006
Barito Utara	126 494	127 479	128 400	129 287	130 019

Sumber : Proyeksi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah 2010-2020

Lampiran 3 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara KB dan Daerah Tinggal di Kabupaten Barito Utara, 2016-2018 (Persen)

Alat/Cara Kontrasepsi	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Sterilisasi wanita/tubektomi/ MOW	0,27	1,73	0,00
Sterilisasi pria/vasektomi/MOP	0,00	0,00	0,47
IUD/AKDR/spiral	0,77	1,31	0,22
Suntikan	51,25	56,51	54,27
Susuk KB/implan	5,91	3,11	5,52
Pil	41,81	35,40	39,20
Kondom pria/karet KB	0,00	0,00	0,30
Intravag/kondom wanita/diafragma	0,00	0,00	0,00
Lainnya	0,00	1,95	0,00
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016-2018 (Diolah)

**Lampiran 4 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Barito Utara,
2014-2018**

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tenaga Medis (Dokter)	24	52	42	39	26
Tenaga Keperawatan	208	161	365	307	215
Tenaga Kebidanan	123	111	181	173	182
Tenaga Kefarmasian	16	14	25	30	19
Tenaga Kesehatan Lainnya	-	72	21	223	91

Keterangan : - Tahun 2013-2014 tenaga medis (dokter) terdiri dari dokter umum dan dokter gigi.

- Tahun 2015-2017 tenaga medis (dokter) terdiri dari dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi.

- Tahun 2018 tenaga kesehatan lainnya hanya mencakup ahli gizi.

Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2015-2019

Lampiran 5 Jumlah Murid, Guru, dan Sekolah di Kabupaten Barito Utara, Tahun Ajaran 2013/2014-2017/2018

Jenjang Pendidikan	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Murid					
SD	20 235	19 698	19 024	18 232	17 752
SMP	7 319	6 632	7 796	7 865	7 755
SMA	4 939	4 866	5 461	5 465	6 235
Jumlah Guru					
SD	2 241	2 049	2 031	1 831	1 984
SMP	654	644	731	735	641
SMA	582	481	735	626	532
Jumlah Sekolah					
SD	189	196	184	183	186
SMP	38	40	45	47	45
SMA	25	24	26	27	25

Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2015-2019

Lampiran 6 Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Barito Utara, 2016-2018 (Persen)

Bahan Utama Bangunan Rumah	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Lantai			
Marmer/Keramik/Granit	10,83	7,25	13,13
Ubin/Tegel/Teraso/Parket/Vinil/Permadani	0,56	0,61	0,47
Kayu/Papan Kayu/Bambu	77,19	85,28	75,31
Semen/Bata Merah	10,81	6,53	11,09
Tanah	0,60	0,34	-
Lainnya	-	-	-
Atap			
Beton	1,59	1,36	0,63
Genteng	9,09	4,83	7,64
Kayu/Sirap	23,06	26,80	23,04
Seng	58,80	52,73	59,64
Asbes	7,23	14,28	8,66
Jerami/ijuk/daun daunan/ rumbia	0,23	-	0,07
Lainnya	-	-	0,32
Dinding			
Tembok	16,85	10,49	14,92
Kayu/Batang Kayu	82,29	89,22	83,68
Bambu/Anyaman Bambu	0,15	-	0,30
Lainnya	0,71	0,29	1,10

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016-2018 (Diolah)

**Lampiran 7 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama
Untuk Minum di Kabupaten Barito Utara, 2016-2018
(Persen)**

Sumber Air Utama untuk Minum	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Air kemasan bermerk	0,33	-	1,71
Air isi ulang	29,63	54,48	39,14
Leding meteran	20,27	20,74	15,53
Leding eceran	1,01	-	-
Sumur bor/pompa	4,71	4,17	7,13
Sumur terlindung	10,23	5,34	10,60
Sumur tak terlindung	5,85	5,03	3,30
Mata air terlindung	4,29	4,89	5,25
Mata air tak terlindung	4,52	2,92	5,14
Air sungai	17,08	2,45	11,57
Air hujan	2,08	-	0,64
Lainnya	-	-	-
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016-2018 (Diolah)

**Lampiran 8 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan
Utama di Kabupaten Barito Utara, 2018 (Persen)**

Kabupaten/Kota	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik
(1)	(2)	(3)	(4)
Kotawaringin Barat	79,89	19,65	0,46
Kotawaringin Timur	89,84	7,52	2,64
Kapuas	85,90	10,76	3,34
Barito Selatan	88,50	9,02	2,48
Barito Utara	83,71	11,76	4,53
Sukamara	77,37	21,38	1,25
Lamandau	70,85	23,12	6,03
Seruyan	55,55	42,99	1,46
Katingan	83,67	14,59	1,74
Pulang Pisau	99,33	0,00	0,67
Gunung Mas	59,34	30,38	10,28
Barito Timur	91,57	3,56	4,87
Murung Raya	52,93	33,10	13,97
Palangka Raya	100,00	0,00	0,00
Kalimantan Tengah	82,78	14,26	2,96

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018 (Diolah)

Lampiran 9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018

Kabupaten/Kota	TPAK		TPT	
	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kotawaringin Barat	68,44	72,28	2,17	3,01
Kotawaringin Timur	63,21	68,51	4,92	4,55
Kapuas	67,70	69,55	5,42	4,08
Barito Selatan	61,71	62,28	4,09	4,33
Barito Utara	69,05	73,97	5,19	4,34
Sukamara	73,61	74,18	4,83	4,39
Lamandau	73,00	67,93	1,35	2,42
Seruyan	72,86	74,90	4,79	4,40
Katingan	65,97	69,49	3,81	4,78
Pulang Pisau	74,72	70,98	1,62	2,15
Gunung Mas	74,87	75,76	1,17	2,19
Barito Timur	74,11	79,09	4,68	3,50
Murung Raya	68,83	69,58	2,78	3,37
Palangka Raya	62,40	62,99	7,26	5,81
Kalimantan Tengah	67,74	70,03	4,23	4,01

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2017-2018 (Diolah)

Lampiran 10 Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kabupaten/Kota, 2018 (Rupiah)

Kabupaten/Kota	Makanan	Non Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kotawaringin Barat	731 495	718 543	1 450 038
Kotawaringin Timur	582 992	563 329	1 146 321
Kapuas	469 754	359 092	828 846
Barito Selatan	567 545	456 417	1 023 961
Barito Utara	623 031	511 136	1 134 167
Sukamara	771 060	886 335	1 657 394
Lamandau	777 574	783 313	1 560 886
Seruyan	636 171	570 471	1 206 643
Katingan	653 413	502 717	1 156 130
Pulang Pisau	577 820	419 269	997 088
Gunung Mas	713 916	630 788	1 344 704
Barito Timur	605 265	561 621	1 166 886
Murung Raya	614 736	539 004	1 153 740
Palangka Raya	770 961	943 783	1 714 744
Kalimantan Tengah	632 493	591 814	1 224 307

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018 (Diolah)

ISTILAH TEKNIS

Air Minum Bersih

Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (*septic tank*) > 10 meter.

Angka Beban Tanggungan

Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.

Angka Kesakitan

Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Indikator ini disebut juga morbiditas.

Angka Melek Huruf

Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Angka Partisipasi Sekolah

Rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama.

Angka Kelulusan

Proporsi murid yang lulus ujian terhadap total seluruh peserta ujian dikali 100.

Angka Partisipasi Murni

Proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan.

Bekerja

Melakukan kegiatan/pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh/membantu memperoleh pendapatan/keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1(satu) jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi). Seseorang yang mempunyai pekerjaan tetap tetapi untuk sementara tidak bekerja, juga dianggap sebagai bekerja.

Distribusi Penduduk

Ukuran yang menyatakan perbandingan jumlah penduduk pada wilayah yang lebih kecil terhadap wilayah administratif yang lebih luas.

Garis Kemiskinan Makanan

Nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari.

Garis Kemiskinan Non-Makanan

Kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan

Ukuran yang menyatakan kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, disebut juga *Poverty Gap Index* atau P1.

Indeks Keparahan Kemiskinan

Ukuran yang menyatakan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, disebut juga *Poverty Severity Index* atau P2.

Indeks Gini

Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Indeks atau Koefisien Gini terletak antara 0, yang mencerminkan pemerataan sempurna, dan 1 yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.

Jumlah Jam Kerja Seluruhnya

Jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal diluar pekerjaan).

Kepadatan Penduduk

Rata-rata banyaknya penduduk per km².

Lapangan Usaha

Bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja seseorang. Kegiatan in mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam satu digit.

Masih Bersekolah

Sedang mengikuti suatu pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah atau tinggi.

Pendagogik

Ilmu Pendidikan Anak.

Penduduk

Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan, tapi bertujuan untuk menetap.

Penduduk Usia Kerja

Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

Penduduk Miskin

Penduduk yang memiliki nilai rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Penganggur

Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

Pengangguran Terbuka

Mereka yang termasuk pengangguran terbuka adalah :

1. yang mencari pekerjaan.
2. yang mempersiapkan usaha.
3. yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
4. yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pengeluaran

Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Sementara bukan makanan mencakup pengeluaran perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Pekerja Tidak Dibayar

Seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat gaji.

Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan disebut juga *Head Count Index (HCI)* atau P0.

Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)

Orang yang mempraktekkan salah satu metode kontrasepsi.

Rasio Jenis Kelamin

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu.

Rata-Rata Lama Sakit

Banyaknya hari sakit pada penduduk yang mengalami gangguan/keluhan kesehatan.

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Status Pekerjaan

Kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan pekerjaan.

Tamat Sekolah

Menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase.



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



***BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO UTARA***

Jl Jend A. Yani No 143

Muara Teweh 73811

Telp: (0519) 21070, Fax: (0519) 24715

Homepage: <http://barutkab.bps.go.id>

E-mail: bps6205@bps.go.id



9 772554 415004